

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL BAHAYA
PANDEMI COVID-19 TERHADAP KESELAMATAN BANGSA**

Oleh :

FERNANDO SITUMEANG, S.T.
KOLONEL LAUT (T) NRP 10373/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul **“Peningkatan Kewaspadaan Nasional Bahaya Pandemi Covid-19 Terhadap Keselamatan Bangsa”**. Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap Kepada Peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXII Tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI Bapak Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Marsekal Pertama TNI Andi Wijaya dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas dari taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang menjadi *stake holder* dalam peningkatan kewaspadaan nasional guna meningkatkan keselamatan negara dapat mempertangguh ketahanan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fernando Situmeang, S.T.
Pangkat : Kolonel Laut (T) NRP 10373/P
Jabatan : Direktur Pembinaan
Instansi : TNI AL
Alamat : Jl. Teguh V Selatan no.34 Kelapa Gading Barat. Jakarta
Utara

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Fernando Situmeang, S.T.
Kolonel Laut (T) NRP 10373/P

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Fernando Situmeang, S.T.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke 62
tahun 2021

Judul Taskap: **Peningkatan Kewaspadaan Nasional Bahaya**

Pandemi Covid-19 Terhadap Keselamatan Bangsa

Taskap tersebut di atas telah ditulis "sesuai/tidak sesuai" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021 Tanggal 18 Februari 2021, karena itu "layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk di uji.
" coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, 29 Juli 2021

Tutor Taskap,

Marsekal Pertama TNI Andi Wijaya
Taji Madya Bid. Ideologi Lemhannas RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum.....	1
2. Perumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian-pengertian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundang-undangan.....	10
9. Kerangka Teoritis	12
10. Data dan Fakta.....	14
11. Perkembangan Lingkungan Strategis.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum.....	28
13. Kondisi Kewaspadaan Nasional Bahaya Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Pada bidang Ekonomi dan Kesehatan	28
14. Tata Kelola Peningkatan Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bahaya Pandemi Covid-19 Sebagai Bagian Dari Ancaman Nirmiliter.....	37
15. Langkah Strategi Peningkatan Kewaspadaan Nasional Mengadapi Bahaya Pandemi Covid-19 Sebagai bagian Dari Ancaman Nirmiliter	46

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	59
17. Rekomendasi	60

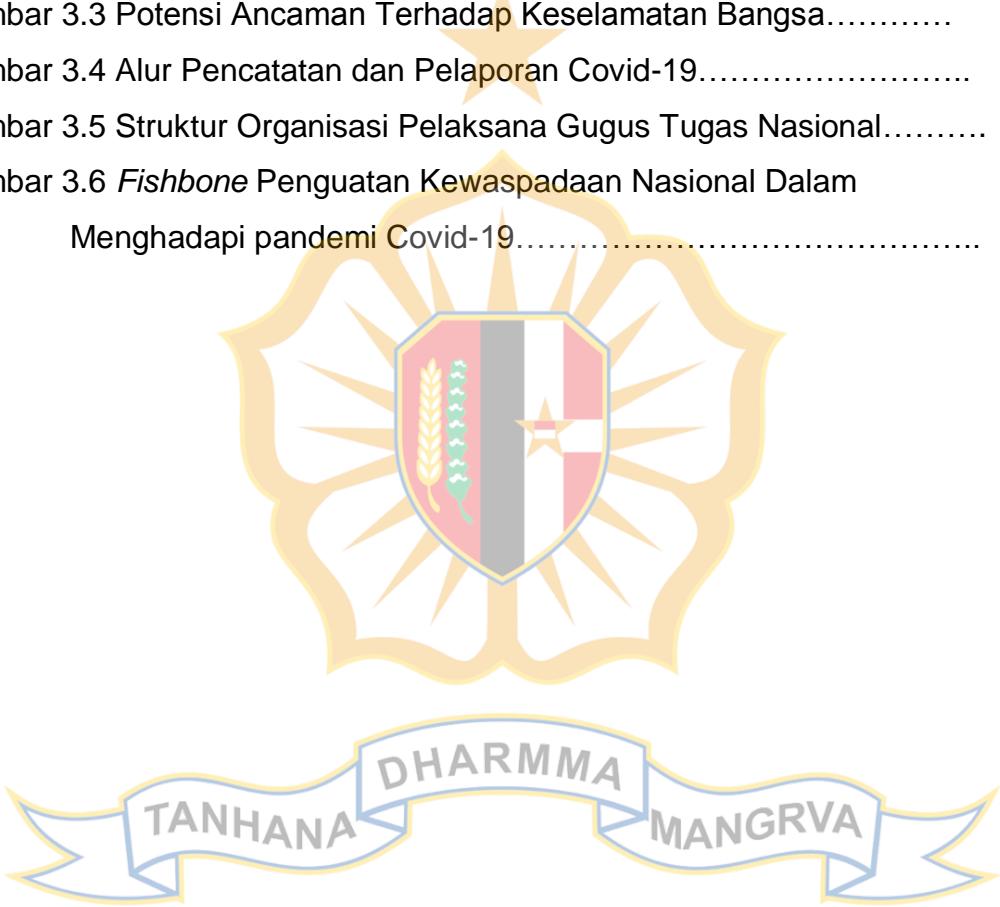
DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR
2. RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2011-2019	3
Gambar 2.1 Macam Bencana.....	19
Gambar 2.2 Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	21
Gambar 2.3 Pengujian Rapid Test Potensi Terjangkit Covid-19 ASEAN	23
Gambar 3.1 Angka Penyebaran Covid-19.....	30
Gambar 3.2 Pertumbuhan Perekonomian Nasional	32
Gambar 3.3 Potensi Ancaman Terhadap Keselamatan Bangsa.....	41
Gambar 3.4 Alur Pencatatan dan Pelaporan Covid-19.....	44
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas Nasional.....	45
Gambar 3.6 <i>Fishbone</i> Penguatan Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi pandemi Covid-19.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

Sejak kasus penyebaran pandemi Covid-19 yang telah menular sejak bulan Oktober 2019 dari wilayah Wuhan China, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi sejak tanggal dimana Presiden Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19 dengan adanya dua orang Indonesia yang tertular dari seorang wisatawan dari Jepang tanggal 2 Maret 2020.¹ Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia Covid-19 per 25 Juli 2021 telah menjangkiti 3.166.505 orang positif, kejadian kasus aktif sebanyak aktif 573.908 (18,1 persen), korban meninggal sebanyak 83.279 (2,6 persen) dan pasien sembuh sebanyak 2.509.318 (79,2 persen).² Penyebaran pandemi Covid-19 juga memberikan dampak lanjutan seperti penurunan pandapatan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penyebaran pandemi Covid-19 ini memberikan dampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional sebelum terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 tumbuh sebesar 5,02 persen, *Product Domestik Brutto* (PDB) sebesar 15.834 triliun dan PDB per kapita sebesar 59,1 juta pertahun.³ Semenjak penyebaran pandemi Covid-19 pertumbuhan perekonomi nasional triwulan ke-I/2020 sebesar 2,97 persen, triwulan ke-II/2020 sebesar minus 5,32 persen, triwulan ke-III/2020 sebesar minus 3,49 persen dan triwulan ke-IV/2020 sebesar minus 2,19 persen.⁴ Secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2020 berada di kisaran minus 2,07 persen yang pada awalnya penyebaran Covid-

¹ Widhana, Dieqy Hasbi. 2020. Riwayat Perjalanan Pasien Positif Corona COVID-19 Di Indonesia. Tirto, Jakarta, Tirto.Id, [Https://Tirto.Id/Riwayat-Perjalanan-Pasien-Positif-Corona-Covid-19-Di-Indonesia-Ecn3](https://Tirto.Id/Riwayat-Perjalanan-Pasien-Positif-Corona-Covid-19-Di-Indonesia-Ecn3)

² Satgas Covid-19. 2021. Peta Sebaran. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

³ BPS. 2019. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019. Jakarta.

⁴ Dradjad H Wibowo. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen. Jakarta. Kompas.Com. <Https://Money.Kompas.Com/Read/2020/08/06/122846926/Pertumbuhan-Ekonomi-Minus-532-Persen-Sekali-Lagi-Tolong-Kendalikan-Pandeminya?Page>All>

19 terjadi diproyeksikan tumbuh sebesar 2,3 persen.⁵ Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional pada dua kuartal secara berkelanjutan dampak dari penyebaran Covid-19 akan berakibat terjadinya resesi.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2011-2019

Sumber: BPS, 2020.

Adanya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia disebabkan oleh rendahnya sikap kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu keselamatan bangsa. Rendahnya tingkat kewaspadaan nasional bangsa Indonesia diindikasikan dengan, **Pertama**, keterbatasan kemampuan dalam mendekripsi dini terhadap dampak penyebaran pandemi Covid-19 yang dapat menyebabkan tingkat kematian masyarakat Indonesia sampai pada tingkat sebesar 2,75 persen.⁶ **Kedua**, rendahnya kemampuan mengidentifikasi dampak penyebaran pandemi Covid-19 terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai pengaruh terhadap hubungan sosial antara masyarakat terutama pada dunia pendidikan yang berbasis *online*. **Ketiga**, rendahnya kemampuan menganalisis terhadap daya tahan masyarakat (Imunitas) terhadap Virus Covid-19, sehingga masyarakat Indonesia merasa

⁵ Hendra Kusuma. 2020. Ekonomi RI Babak Belur Dihantam Corona. Jakarta. Detik Finance.Com. <Https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-5193430/Ekonomi-Ri-Babak-Belur-Dihantam-Corona>

⁶ BNPB, 2021. Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Masyarakat. Jakarta

memiliki daya tahan karena sering mengkonsumsi rempah-rempah.⁷ **Keempat**, rendahnya kemampuan analisis ini juga diindikasikan pernyataan dari pemerintah bahwa virus Covid-19 kemungkinan kecil dapat menular di negara Indonesia yang berada di wilayah tropis yang memiliki cuaca panas.⁸ **Kelima**, dalam hal kemampuan penanganan pandemi Covid-19 ini juga terdapat kebijakan pemerintah yang kurang tepat dalam memprediksi dampak penyebaran pandemi Covid-19, sehingga pada saat negara Cina membutuhkan peralatan dan sarana kesehatan, pemerintah memberikan ijin kepada para pengusaha dalam melakukan kegiatan ekspor dan reekspor alat dan sarana kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan *hand sanitizer* ke luar negeri.⁹ Kebijakan ini berdampak pada sarana dan peralatan kesehatan menjadi langka, sehingga menyebabkan terjadi kenaikan harga karena masyarakat berusaha untuk memiliki. Sebagai dampak dari kelima kondisi tersebut, memberikan dampak buruk pada aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Oleh karena itu **diperlukan peningkatan kewaspadaan nasional** untuk menjaga keselamatan bangsa.

Pentingnya menjaga keselamatan bangsa, karena dari berbagai data dan fakta bahwa bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman nirmiliter termasuk penyebaran pandemi Covid-19. Setiap negara memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan bangsa dari berbagai ancaman yang mengganggu berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi apapun, keselamatan bangsa menjadi fokus utama untuk diperjuangkan oleh semua negara.¹⁰ Merupakan kewajiban negara untuk senantiasa menjaga keselamatan masyarakatnya. Tidak jarang dalam upaya menjaga keselamatan bangsa, antar negara saling berkompetisi untuk

⁷ Rezkisari, Indira. 2020. Melawan Corona Dengan Rempah-Rempah Tradisional. Republika. Jakarta, Republika.Co.Id, <Https://Republika.Co.Id/Berita/Q6khjy328/Melawan-Corona-Dengan-Rempahrempah-Tradisional>

⁸ Putratama, Rozar. 2020. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Pandemi COVID-19, Press Release. Badaan Metrologi Geofisika Dan Klimatologi, Jakarta, BMKG, <Https://Www.Bmkg.Go.Id/Press-Release/?P=Pengaruh-Cuaca-Dan-Iklim-Terhadap-Pandemi-Covid-19&Tag=Press-Release&Lang=ID>

⁹ Ferdianto, Rizky. 2020. Tidak Ada Negara Kebal Penyelundupan. Tempo, Jakarta, PT Tempo Inti Media Tbk, <Https://Majalah.Tempo.Co/Read/Hukum/160221/Wawancara-Dirjen-Bea-Cukai-Heru-Pambudi-Soal-Larangan-Ekspor-Apd-Hingga-Penyelundupan>

¹⁰ Indrawan, Jerry. 2015. Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritime. *Jurnal Pertahanan* Vol 5 (2). Pp.93-114

memiliki dominasi guna menjaga keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.¹¹ Bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan diikat oleh kesamaan seperti kesatuan ras, agama/kepercayaan, tradisi, sejarah, daerah, adat istiadat dan bahasa.¹² Dari pengertian tersebut keselamatan bangsa dapat didefinisikan sebagai keselamatan dari seluruh masyarakat yang secara sosiologi dan antropologi memiliki ikatan dalam hal kesatuan ras, agama/kepercayaan, tradisi, sejarah, daerah, adat istiadat dan bahasa. Manjaga keselamatan bangsa dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari berbagai potensi ancaman yang berpeluang mengganggu keselamatan hidup dan penghidupan baik dalam hal pangan, ekonomi, kesehatan, energi, kenyamanan beribadah, keamanan dan ketertiban.

Permasalahan kesehatan pada kejadian kasus Covid-19 tidak hanya menjadi satu aspek kesehatan saja, akan tetapi telah memicu permasalahan lain seperti menurunnya pendapatan masyarakat karena aktifitas usahanya sekitar 80 persen menurun.¹³ Di lain hal permasalahan Covid-19 juga telah menimbulkan berbagai tindak kriminal di masyarakat seperti pencurian, penjambretan dan perampokan.¹⁴ Kejadian Covid-19 juga telah menurunkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁵ Dampak pandemi Covid-19 pada bidang politik juga telah menimbulkan perpecahan pendapat pada elit politik Indonesia antara yang setuju untuk melakukan *lockdown* secara penuh dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dan kebijakan PPKM Darurat.

¹¹ Sulisworo, Dwi; Wahyuningsih, Tri Dan Arif, Dikdik Baehaqqi. 2012. *Identitas Nasional*. Program Hibah PKN, Jakarta.

¹² Jutmini, Sri. Winarno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Tiga Serangkai: Surakarta.

¹³ Ramadhan, Pipit Eka. 2020. Nasib Dunia Usaha Di Tengah Pandemi Corona, Siapa Bertahan, Tertekan Atau Justru Tumbuh? Liputan 6. Jakarta, Liputan6.Com, <Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4228742/Headline-Nasib-Dunia-Usaha-Di-Tengah-Pandemi-Corona-Siapa-Bertahan-Tertekan-Atau-Justru-Tumbuh#>

¹⁴ Kumalasari, Alfianasyah. 2020. Mewaspadai Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19. Bali Express. Denpasar, PT Jawa Pos Multi Media, <Https://Baliexpress.Jawapos.Com/Read/2020/05/01/191867/Mewaspadai-Kriminalitas-Saat-Pandemi-Covid-19>

¹⁵ Sanjoyo, Danu. 2020. Mengantisipasi Dampak Covid-19 Ke Perekonomian Nasional. Media Indonesia, Jakarta, Media Group, <Https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/296853-Mengantisipasi-Dampak-Covid-19-Ke-Perekonomian-Nasional>

Menurut Doni Monardo (2020), pemutusan rantai penyebaran Covid-19 perlu dilaksanakan melalui disiplin secara kolektif untuk mematuhi pada protokol kesehatan.¹⁶ Pemutusan rantai penyebaran Covid-19 tidak dapat dilakukan secara individu, akan tetapi secara kolektif masyarakat perlu terlibat untuk saling mengingatkan apabila ada anggota masyarakat yang tidak mentaati pada protokol kesehatan. Dalam hal pemutusan penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan Normal Baru (*New Normal*), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dan kebijakan PPKM Darurat pada wilayah Provinsi Jawa dan Bali, dimaksudkan untuk memutus penyebaran Covid-19, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemutusan rantai penyebaran.

Melihat pada data dan fakta yang telah disampaikan di atas dapat dipahami pentingnya bangsa Indonesia meningkatkan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia untuk menjaga keselamatan bangsa dari bahaya pandemi Covid-19. Upaya peningkatan kewaspadaan nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan *leading sector* adalah lembaga pemerintah dalam memberikan pengaruh pada pemahaman tentang penyebaran Covid-19. Peningkatan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi penyebaran pandemi Covid-19 ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan (Prokes), sehingga penyebaran virus Covid-19 dapat dihentikan. Peningkatan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia ini terkait dengan sikap nasionalisme yang ditumbuhkan dari kepedulian dan bagian dari tanggung jawab dan perhatian masyarakat Indonesia dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman.¹⁷ Kewaspadaan nasional merupakan kondisi dimana bangsa Indonesia menyadari potensi yang akan dihadapi kedepan, yang didasarkan pada kondisi-kondisi sebelumnya. Kewaspadaan nasional

¹⁶ Agus Wibowo. 2020. Covid-19 Mewabah, Doni Monardo Ingatkan Pentingnya Disiplin Kolektif. Jakarta. Satuan Tugas Penanganan Covid-19. <Https://Covid19.Go.Id/P/Berita/Covid-19-Mewabah-Doni-Monardo-Ingatkan-Pentingnya-Disiplin-Kolektif>.

¹⁷ Rahmat Pribadi, 2021. Kewaspadaan Nasional. Jakarta. Hal. 3

dilakukan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat mengancam kedaulatan dan keselamatan bangsa. Peningkatan kewaspadaan tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi data dan kejadian awal, sehingga bisa membuat analisis secara komprehensif akan potensi ancaman yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa kedepan.

Dari latar belakang tersebut di atas penulis akan menyusun sebuah karya tulis dengan judul **peningkatan kewaspadaan nasional bahaya pandemi Covid-19 terhadap keselamatan bangsa**. Sebagai bahan analisis, penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari sumber data laporan kebencanaan BNPB, data laporan WHO dan berbagai sumber media massa *main stream* di tanah air. Penulisan Taskap disajikan yang didasarkan pada data sekunder terkait dengan peningkatan kewaspadaan nasional guna mencegah potensi ancaman nirmiliter bahaya pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian diharapkan akan mampu memberikan solusi bagi upaya meningkatkan kewaspadaan nasional guna mencegah potensi ancaman yang dapat mengganggu keselamatan bangsa Indonesia melalui penyusunan berbagai langkah strategis. Dengan demikian dengan peningkatan kewaspadaan nasional diharapkan mampu memutus rantai penyebaran bahaya pandemi Covid-19 dan mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga dapat menjaga keselamatan bangsa.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi rumusan masalah yaitu **bagaimana meningkatkan kewaspadaan nasional bahaya pandemi Covid-19 terhadap keselamatan bangsa**, dengan beberapa pertanyaan penelitian yang meliputi:

- a. Bagaimana kondisi kewaspadaan nasional bangsa Indonesia pada bahaya pandemi Covid-19 dan dampaknya pada aspek ekonomi dan kesehatan?

- b. Bagaimana tata kelola untuk meningkatkan kewaspadaan nasional untuk menghadapi bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter?
- c. Bagaimana strategi meningkatkan kewaspadaan nasional pada bahaya pandemi Covid-19 terhadap keselamatan bangsa?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Penulisan Taskap ini dimaksudkan guna memberikan gambaran, analisis dan pembahasan serta rekomendasi dari permasalahan yang ditemukan pada peningkatan kewaspadaan nasional untuk meningkatkan keselamatan bangsa pada bahaya pandemi Covid-19.
- b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran kepada pemangku kebijakan negara terkait pemecahan permasalahan pada peningkatan kewaspadaan nasional untuk meningkatkan keselamatan bangsa.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup pada penulisan Taskap adalah pada peningkatan kewaspadaan nasional pada bahaya pandemi Covid-19 terhadap bidang ekonomi dan kesehatan, aspek tata kelola dan strategi untuk meningkatkan kewaspadaan nasional guna meningkatkan keselamatan bangsa.

b. Sistematika

- 1) **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan Taskap ini dilanjutkan dengan perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metoda dan pendekatan serta pengertian.
- 2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini diuraikan tentang peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis dan

perkembangan lingkungan strategis, sebagai acuan dalam pokok-pokok pembahasan peningkatan kewaspadaan nasional pada penanganan pandemi Covid-19 .

- 3) **BAB III PEMBAHASAN.** Pada bab ini akan dijelaskan pokok-pokok bahasan peningkatan kewaspadaan nasional pada penanganan pandemi Covid-19 yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, tinjauan teori, data dan fakta, perkembangan lingkungan strategis untuk meningkatkan keselamatan bangsa.
- 4) **BAB IV PENUTUP.** Pada bab ini akan dijelaskan simpulan dan rekomendasi dari perumusan masalah secara singkat dan lugas terkait peningkatan kewaspadaan nasional pada penanganan pandemi Covid-19 guna meningkatkan keselamatan bangsa pada aspek tata kelola dan strategi peningkatan kewaspadaan nasional pada bahaya pandemi Covid-19 terhadap keselamatan bangsa.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Metode penulisan yang digunakan pada Taskap ini adalah metode analisis kualitatif yang menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur dari data sekunder dan wawancara dengan tenaga profesional di Lemhannas RI pada bidang kewaspadaan nasional.
- b. **Pendekatan.** Penulisan taskap ini menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan pada elemen yang berpengaruh pada peningkatan kewaspadaan nasional untuk meningkatkan keselamatan bangsa pada studi kasus penyebaran Covid-19.

6. Pengertian

- a. **Kewaspadaan nasional** adalah suatu kondisi bangsa Indonesia yang memiliki kualitas kesiapiagaan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa dengan kemampuan untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan

melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.¹⁸

- b. **Ancaman** adalah setiap usaha, kerja, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau terbukti membahayakan keselamatan, keamanan, kedaulatan, integritas wilayah Indonesia, dan kepentingan negara dalam pelbagai bidang dan aspek Ipoleksosbudhankam.¹⁹
- c. **Pandemi** adalah wabah yang menyebar secara serentak di mana saja, meliputi kawasan geografi yang luas.²⁰
- d. **Keselamatan bangsa** adalah kebijakan spesifik untuk menjaga keselamatan bangsa baik aspek demografi (warga negara), fisik (teritorial), ekonomi dan politik.²¹
- e. **Pembatasan sosial berskala besar** (PSBB) adalah pembatasan terhadap kegiatan tertentu penduduk di kawasan yang adanya penyebaran penyakit dan / atau tercemar sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan menyebarluaskan penyakit atau pencemaran.²²
- f. **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro** adalah sebuah kebijakan pemerintah dengan peraturan bahwa jumlah pekerja sebanyak 75 persen dengan protokol yang ketat, kegiatan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara *online*, tempat-tempat ibadah dapat dibuka dengan kapasitas maksimum 50 persen, sektor penting dapat beroperasi 100 persen dengan pembatasan pada waktu operasi dan juga pengunjung.²³

¹⁸ Pokja Lemhannas, 2021, *Pengertian Kewaspadaan Nasional*, Jakarta, Hal. 50.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

²⁰ Wudya, Niken Yunita. 2020. Memahami Lagi Arti Lockdown, COVID-19, Dan Pandemi. Detik News, Jakarta, Detik Network, <Https://News.Detik.Com/Berita/D-4956587/Memahami-Lagi-Arti-Lockdown-Covid-19-Dan-Pandemi>

²¹ Morgenthau, Hans J. 1948. *Politics Among Nations, The Struggle For Power And Peace*. Associate Professor Of Political Science, The University Of Chicago. New York: Alfred A Knopf.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

²³ Luthfia Ayu Azanella. 2021. PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya Dengan PPKM?. Kompas.

Jakarta. Kompas.Com <Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2021/02/09/060200565/Ppkm-Mikro-Berlaku-Apa-Bedanya-Dengan-Ppkm-?Page=All>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pentingnya peningkatan kewaspadaan nasional untuk menghadapi berbagai potensi ancaman termasuk pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter merupakan kegiatan untuk menjaga keselamatan bangsa. Dalam peningkatan kewaspadaan nasional ini dilakukan dengan mendasarkan pada tinjauan literatur yang telah ada baik dari dalam maupun luar negeri. Penyebaran Covid-19 akan memberikan pengaruh terhadap keselamatan bangsa sebagai dampak dari menurunnya kewaspadaan nasional. Adanya kondisi dimana setiap pandemi Covid-19 adalah bagian dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasional dengan melakukan analisa dan aksi pencegahan terhadap menyebarnya Covid-19. Dalam peningkatan kewaspadaan nasional diperlukan tinjauan pustaka secara komprehensif untuk menganalisis peningkatan kewaspadaan nasional untuk mengantisipasi ancaman negara pada aspek nirmiliter pasca pandemi Covid-19.

8. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan peningkatan kewaspadaan nasional bahaya pandemi Covid-19 terhadap keselamatan bangsa meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.** Pasal 1 menjelaskan bahwa kejadian bencana yang dimaksudkan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan orang yang disebabkan, baik oleh faktor alam jadi dan / atau faktor bukan alam serta faktor manusia seperti bencana sosial yang boleh mengakibatkan korban jiwa, kerusakan alam sekitar, kerugian harta benda, dan dampak

psikologis. Pada pasal 11 menjelaskan bahwa untuk melakukan penanggulangan bencana dan pelaksana dalam penanggulangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 1 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian apabila terjadi bencana di luar yang telah dijelaskan pada pasal 1, pemerintah akan membentuk badan pelaksana atau yang dikenal sebagai Satgas penanggulangan bencana, seperti pada penanggulangan bencana pandemi Covid-19 ditunjuk BNPB sebagai pelaksana.

b. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Pada pasal 1 menjelaskan bahwa ancaman adalah adalah setiap usaha, kerja, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan / atau terbukti membahayakan keselamatan negara, keamanan, kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan negara dalam berbagai aspek Ipoleksosbudhankam.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 menjelaskan bahwa karantina kesehatan ditujukan untuk mencegah keluar atau masuknya penyakit dan / atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan keadaan darurat bagi kesehatan masyarakat. Dengan peraturan ini pemerintah melakukan pencegahan dini terhadap potensi masuknya penyakit dari luar Indonesia melalui pembatasan dan pencegahan barang atau manusia yang akan memasuki wilayah Indonesia.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus/Desease 2019 (Covid-19). Pasal 3 menjelaskan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk untuk meningkatkan daya tahan nasional dalam sektor kesehatan, mempercepat pengendalian Covid-19 melalui sinergi antara kementerian / lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan pencegahan terhadap

perkembangan peningkatan penyebaran Covid-19, meningkatkan sinergi pada kegiatan operasi, dan meningkatkan kesiapan dan usaha untuk mencegah terhadap penyebaran Covid-19.

- e. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.** Sesuai dengan pasal 2 bahwa kewaspadaan dini dilakukan dengan melakukan mendekripsi, mengenal secara pasti, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyampaikan informasi untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai bentuk ATHG di daerah.

9. Kerangka Teoritis

- a. **Teori Kewaspadaan Nasional Sesuai Literatur Lemhannas RI (2021).**

Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bermegara dari suatu potensi ancaman.²⁴ Kewaspadaan nasional juga merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendekripsi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI.

Kewaspadaan nasional dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggungjawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, kewaspadaan nasional harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus-menerus terhadap berbagai implikasi situasi serta kondisi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri.²⁵

Berdasarkan analisa ancaman yang paling mungkin adalah ancaman non-tradisional, yaitu setiap aksi melalui berbagai aspek yang

²⁴ Pokja, BS. Lemhannas. 2021. Kewaspadaan Nasional. Lemhannas RI, Jakarta

²⁵ Riyanto, Joko. 2017. Kewaspadaan nasional, Bela Negara dan Integrasi Nasional. Media Informasi Kemhan, Wira, Vol 67 (51). Jakarta.

mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia.

b. Teori Kebijakan (Policy) Menurut Suharto (2008)

Kebijakan (*policy*) adalah peraturan bertulis yang merupakan keputusan organisasi formal, yang mengikat, yang mengatur tingkah laku dengan tujuan untuk mewujudkan nilai-nilai baru dalam masyarakat.²⁶ Kebijakan akan menjadi pedoman bagi anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam kegiatan. Definisi ini menunjukkan bahwa dasar tersebut dibuat oleh lembaga pemerintah dan bukan sektor swasta. Sebagai keputusan yang mengikat masyarakat, dasar utama harus dibuat oleh pihak pemerintah, yakni mereka yang mendapat mandat dari masyarakat, secara nyata melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat.

Dasar pembuatan kebijakan terkait dengan pilihan yang perlu atau tidak seharusnya dibuat oleh lembaga pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat rakyat pada tahap strategi atau garis besar yang dibuat oleh pihak pemerintah.²⁷ Dasarnya adalah penyelesaian masalah dan proaktif. Berbeda dengan undang-undang dan peraturan, kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, walaupun kebijakan juga mengatur apa yang diizinkan dan yang tidak. Dasar-dasar juga diharapkan bersifat umum tetapi tanpa kehilangan ciri khas pada suatu kegiatan. Dalam hal kebijakan harus memberi peluang untuk penafsiran secara khusus untuk menghindarkan kesalahan penafsiran.²⁸

Untuk melakukan keberhasilan kebijakan perlu dilakukan dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu variable isi (*Content Policy*) dan lingkungan pelaksanaan (*Context of Implementation*).²⁹ Variabel isi kebijakan berisi:

²⁶ Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

²⁷ Suharto, Edi. 2008). Ibid

²⁸ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

²⁹ Grindle, Merilee S. 1980. Politics And Policy Implementation In The Third World, Princeton University Press, New Jersey.

seberapa jauh kepentingan suatu kelompok sasaran yang termuat dalam isi sebuah kebijakan, apa manfaat yang diperoleh dari kelompok tersebut, Seberapa jauh dampak perubahan yang direncanakan dari kebijakan tersebut, Apakah kebijakan dan sebuah program sudah tepat, Apakah sebuah kebijakan program telah menyebutkan implementor dengan rinci, dan Apakah sumber daya yang dimiliki telah memadai.

c. Teori Keselamatan Bangsa Menurut Crawford dan Cicero (1984)

Keselamatan bangsa merupakan tujuan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Crawford dan Cicero (1984) menjelaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi *Salus populi suprema lex*).³⁰ Dengan demikian dengan berdirinya sebuah bangsa, maka bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19, keselamatan masyarakat adalah hal yang utama untuk dilakukan penanganan.

Penyebaran Covid-19 merupakan bagian dari ancaman terhadap keselamatan bangsa sehingga segenap bangsa Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan nasional. Sebagai bagian dari ancaman nirmiliter penyebaran Covid-19 harus ditangani secara ketat melalui petaatan terhadap protokol kesehatan.

10. Data dan Fakta

Peningkatan kewaspadaan nasional guna menjaga keselamatan bangsa dari bahaya pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dengan pertimbangan tingkat tindakan yang dapat mengganggu keselamatan rakyat, merugikan bangsa, mengganggu keamanan dan ketertiban, merusak sumber daya lingkungan dan merusak kelestarian lingkungan. Dari data dan fakta yang ada dapat diidentifikasi

³⁰ Crawford, J. W., & Cicero, M. T. (1984). M. Tullius Cicero: The Lost and Unpublished Orations (Vol. 80). Vandenhoeck & Ruprecht.

kondisi kewaspadaan nasional dari penyebaran pandemi Covid-19 yang dapat menurunkan keselamatan bangsa dapat disusun sebagai berikut:

a. Kondisi Kewaspadaan Nasional

Dari berbagai peristiwa dapat diidentifikasi kondisi kewaspadaan bangsa Indonesia masih rendah dalam menghadapi ancaman bahaya pandemi Covid-19. Rendahnya kewaspadaan nasional diindikasikan oleh beberapa hal:

- 1) Keterbatasan pemahaman wewenang dan tanggung jawab serta komunikasi antar aparatur pemerintah dengan lembaga pemerintah dan institusi di daerah, yang telah menimbulkan ketidaksinkronan dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya adanya keputusan Walikota Tegal dalam melakukan *lockdown*, telah menjadikan karut marut penanganan Covid-19 yang berdampak pada kesimpangsiuran dan saling menyalahkan antar masyarakat dan juga lembaga pemerintah.³¹ Hal ini berdampak pada penurunan ekonomi dalam hal pendapatan masyarakat.
- 2) Dengan adanya tingkat penyebaran pandemi Covid 19 di Indonesia yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 tahun 2020 tentang Pengaturan pencegahan penyebaran covid-19 yang berlaku dalam pemerintahan daerah, pada perkembangannya belum memberikan efektifitas bagi Satgas Covid 19 untuk melakukan pemutusan rantai penyebaran bagi di masyarakat. Kondisi tersebut pada satu sisi disebabkan oleh beberapa hal yang meliputi:

³¹ Fikri Yusuf. 2020. Lockdown Daerah, Simbol Karut-Marut Penanganan Corona. CNN Indonesia. [Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200327161721-20-487625/Lockdown-Daerah-Simbol-Karut-Marut-Penanganan-Corona](https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200327161721-20-487625/Lockdown-Daerah-Simbol-Karut-Marut-Penanganan-Corona).

- 1) Belum maksimalnya sinergi antar institusi terkait (Satgas Covid-19, TNI, Polri dan aparatur pemerintah) dengan lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya memutus penyebaran pandemi Covid 19, yang diindikasikan terus meningkat jumlah penderita Covid 19 dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.
- 2) Belum terwujudnya kesatuan kendali, informasi dan komunikasi, sehingga terjadi kesalahan manajemen dalam penanganan Covid 19. Seperti kejadian kesalahan kendali dan komunikasi pada pengiriman mobil PCR dari pusat ke Jawa Timur yang direncanakan untuk melaksanakan pengetesan korban Covid 19 di wilayah Surabaya akan tetapi mobil PCR tanpa koordinasi menuju ke Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Lamongan.³²

b. Penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Penyebaran pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai dampak dari rendahnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh belum optimalnya sinergi antara Satuan Gugus Tugas Penanganan pandemi Covid-19 dengan institusi terkait (Kementerian/LPNK, TNI dan Polri) dan aparatur pemerintah Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 memberikan implikasi belum dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Belum signifikannya penanganan rantai penyebaran Covid-19 disebabkan oleh rendahnya kewaspadaan nasional terutama dalam hal rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.

Penyebaran Covid-19 sangat mempengaruhi jalannya roda perekonomian dari beberapa bidang atau sektor komoditi unggulan

³² Eko Sutriyanto. 2020. Salah Paham Pemkot Surabaya Dan Pemprov Soal Mobil PCR. Surabaya. Tribunnews.Com. <Https://Www.Tribunnews.Com/Regional/2020/05/30/Salah-Paham-Pemkot-Surabaya-Dan-Pemprov-Soal-Mobil-Pcr-Begini-Penjelasan?Page=2>.

Indonesia bahkan sampai menyentuh geliat perekonomian secara umum. Pada bidang sosial budaya penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya kehidupan sosial kemasyarakatan dan tradisi budaya adat di setiap daerah Indonesia. Pada bidang keamanan penyebaran Covid-19 telah berpengaruh terhadap peningkatan kriminalitas. Pentingnya peningkatan kewaspadaan nasional adalah adanya beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) Penyebaran wabah pandemi Covid-19 yang telah menyebar sejak bulan Oktober 2019 dari wilayah Wuhan China, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia sejak tanggal dimana Presiden Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid 19. Penyebaran di Indonesia Covid-19 per 25 Juli 2021 telah menjangkiti 3.166.505 orang positif, kejadian kasus aktif sebanyak aktif 573.908 (18,1 persen), korban meninggal sebanyak 83.279 (2,6 persen) dan pasien sembuh sebanyak 2.509.318 (79,2 persen).³³ Penyebaran pandemi Covid-19 ini menjadi bagian dari ancaman nirimiliter yang perlu dijadikan masukan dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.
- 2) Pandemi Covid 19 tidak hanya menjadi satu aspek kesehatan saja, akan tetapi telah memicu permasalahan lain seperti menurunnya pendapatan masyarakat karena aktifitas usahanya sekitar 80 persen menurun.³⁴ Pada aspek wisata, adanya pandemi Covid 19 juga telah menurunkan jumlah kunjungan wisata ke berbagai lokasi di Indonesia seperti Bali. Pada aspek keamanan, permasalahan Covid 19 juga telah menimbulkan berbagai tindak kriminal di masyarakat seperti pencurian, penjambretan dan perampokan.³⁵

³³ Satgas Covid-19. 2021. Peta Sebaran. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.

³⁴ Ramadhani, Pipit Eka. 2020. Nasib Dunia Usaha Di Tengah Pandemi Corona, Siapa Bertahan, Tertekan Atau Justru Tumbuh? Liputan 6. Jakarta, Liputan6.Com, <Https://Www.Liputan6.Com/Bisnis/Read/4228742/Headline-Nasib-Dunia-Usaha-Di-Tengah-Pandemi-Corona-Siapa-Bertahan-Tertekan-Atau-Justru-Tumbuh#>

³⁵ Kumalasari, Alfianasyah. 2020. Mewaspadai Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19. Bali Express. Denpasar, PT Jawa Pos Multi Media, <Https://Baliexpress.Jawapos.Com/Read/2020/05/01/191867/Mewaspadai-Kriminalitas-Saat-Pandemi-Covid-19>

Kejadian Covid 19 juga telah menurunkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.³⁶ Pada aspek politik juga telah menimbulkan perbedaan pendapat pada elit politik Indonesia antara yang setuju untuk melakukan *lockdown* secara penuh dan berseberangan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kegiatan normal baru (*New Normal*), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dan kebijakan PPKM Darurat pada wilayah Provinsi Jawa dan Bali.

- 3) Covid-19. Wabah Covid-19 yang telah menular sejak bulan Oktober 2019 dari wilayah Wuhan China, menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia sejak tanggal dimana Presiden Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19. Penyebaran Covid-19 ini berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional sebelum terjadinya penyebaran Covid-19 tumbuh sebesar 5,02 persen, *Product Domestic Brutto* (PDB) sebesar 15.834 triliun dan PDB per kapita adalah sebesar 59,1 juta pertahun.³⁷ Semenjak penyebaran pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi nasional triwulan ke-I/2020 sebesar 2,97 persen, triwulan ke-II/2020 adalah sebesar minus 5,32 persen, triwulan ke-III/2020 sebesar minus 3,49 persen dan triwulan IV/2020 adalah sebesar minus 2,19 persen.³⁸

c. Tata Kelembagaan Untuk Menghadapi Pandemi Covid-19 sebagai Bagian dari Ancaman Nirmiliter.

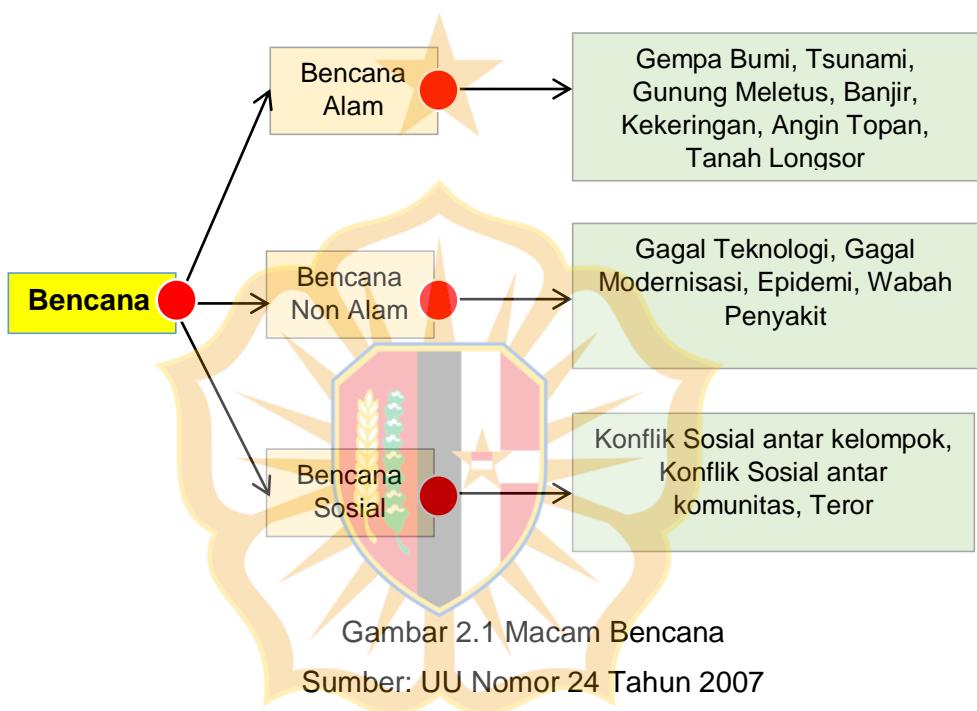
Tata kelembagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter saat

³⁶ Sanjoyo, Danu. 2020. Mengantisipasi Dampak Covid-19 Ke Perekonomian Nasional. Media Indonesia, Jakarta, Media Group, <Https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/296853-Mengantisipasi-Dampak-Covid-19-Ke-Perekonomian-Nasional>

³⁷ BPS. 2019. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019. Jakarta.

³⁸ Dradjad H Wibowo. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen. Jakarta. Kompas.Com. <Https://Money.Kompas.Com/Read/2020/08/06/122846926/Pertumbuhan-Ekonomi-Minus-532-Persen-Sekali-Lagi-Tolong-Kendalikan-Pandeminya?Page>All>.

ini terbentuk pada ancaman bencana. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa untuk penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Penanggulangan bencana dilakukan dengan keterpaduan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bencana yang dimaksud adalah berupa bencana alam, berbagai bencana non alam dan juga bencana sosial, seperti gambar 2.1.



Mekanisme tata kelembagaan dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 saat ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 adalah masuk dalam bagian bahaya non alam yang menjadi bagian dari tugas dan wewenang lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyelenggaraan penanggulangan berbagai bencana dilakukan dengan kegiatan penetapan berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak timbulnya bencana, berbagai kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan juga rehabilitasi. Dengan adanya kondisi penyebaran pandemi Covid-19 yang dapat mengganggu keselamatan bangsa Indonesia, maka diperlukan tata kelola dalam meningkatkan kewaspadaan nasional agar mampu

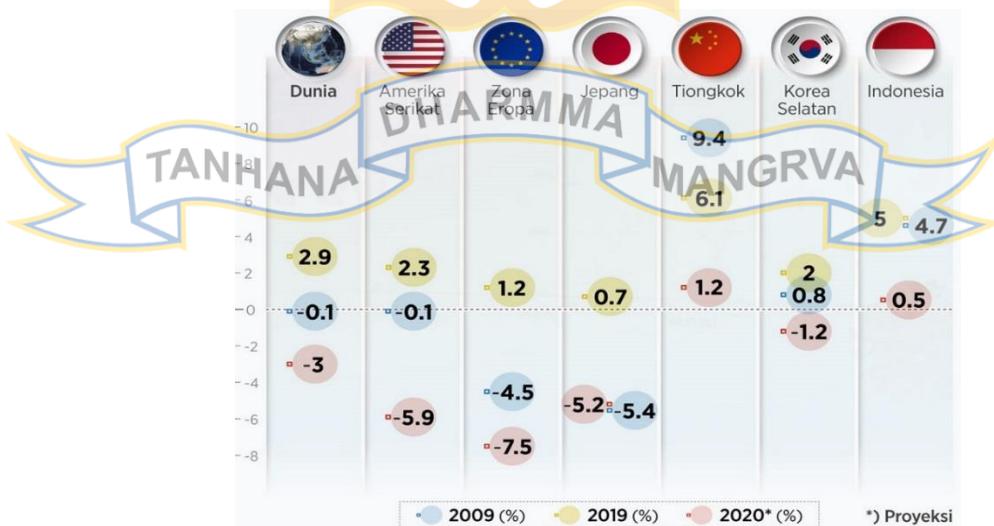
menangani bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter yang dapat mengganggu keselamatan bangsa.

Dengan tata kelola dalam meningkatkan kewaspadaan nasional diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam melakukan kegiatan analisis terhadap potensi ancaman untuk dapat melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanggulangan, sehingga tidak mengganggu terhadap keselamatan bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk mendukung tata kelola yang terstruktur dan terencana dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis

a. **Global.** Perkembangan lingkungan strategis global dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian dunia sampai saat ini masih ditentukan seberapa besar koneksi yang terhubung dari seluruh belahan dunia. Koneksi global ini menuntut adanya keamanan dalam menghadapi potensi ancaman lintas negara. Dengan perkembangan Covid-19 ke 212 negara di dunia, berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.2 Dampak Covid Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Pusparisa, 2020

Pertumbuhan ekonomi sebagai dampak penyebaran Covid-19 tahun 2020 terendah adalah negara Amerika Serikat sekitar -5,9 persen, Jepang -5,2 persen, Korea Selatan -1,2 persen, seperti gambar 2.6.³⁹ Adanya kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi ini menjadi peluang dalam saling membantu dalam mendukung penanggulangan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian dari upaya kewaspadaan nasional.

- 2) Dari data Worldometers hingga 25 Juli 2021 bahwa jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia terkonfirmasi sebanyak 194.712.584 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 176.686.901 pasien sembuh, 4.173.053 orang meninggal dan jumlah kasus aktif adalah sebesar 13.852.630 dengan rincian 13.768.536 (99,4 persen) pasien dengan kondisi ringan dan 84.094 (0,6 persen) dalam kondisi serius.⁴⁰ Dari penderita Covid-19, 5 (lima) negara dengan kasus Covid-19 tertinggi.
- Amerika Serikat: 35.192.552 kasus, 626.737 orang meninggal, total sembuh 29.512.017 orang.
 - India: 31.409.632 kasus, 420.995 orang meninggal, total sembuh 30.571.328 orang
 - Brazil: 19.670.534 kasus, 549.500 orang meninggal, total sembuh 18.340.760 orang
 - Rusia: 6.126.541 kasus, 153.874 orang meninggal, total sembuh 5.490.634 orang
 - Perancis: 5.993.937 kasus, 129.158 orang meninggal, total sembuh 5.675.383 orang

Adanya kondisi peningkatan kasus penyebaran pandemi Covid-19 ini memberikan peluang terhadap kerjasama antar negara untuk dapat segera memutus rantai penyebaran dengan saling memberikan informasi.

³⁹ Pusparisa, Yosepha. 2020. Dunia Diambang Krisis Ekonomi Terburu. Katadata, Jakarta, Katadata.Co.Id, <Https://Katadata.Co.Id/Infografik/2020/04/29/Dunia-Di-Ambang-Krisis-Ekonomi-Terburuk#>

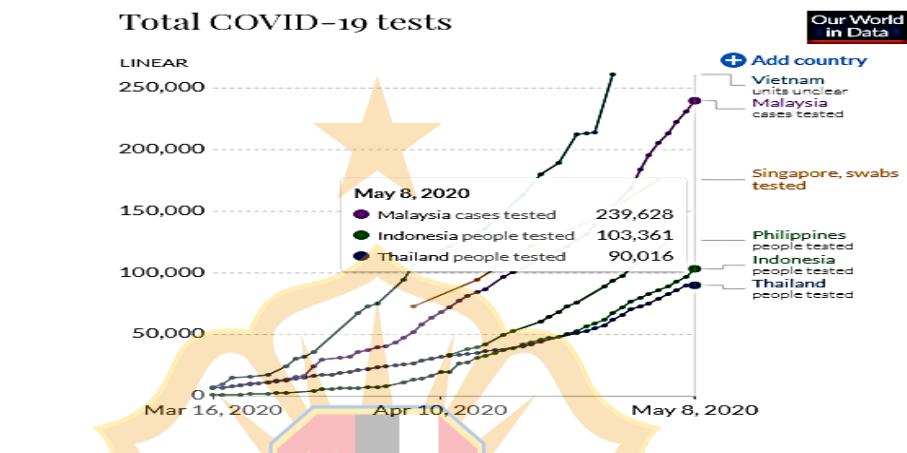
⁴⁰ Worldmeter. 2021. Covid-19 Coronavirus Pandemi. WHO <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

b. Regional

- 1) Indo Pasifik. Konsep Indo-Pasifik ini memiliki banyak persepsi dari cara pandang yang lain sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara aspek maritim. Kebijakan penyeimbang kekuatan Cina yang dimotori Amerika Serikat, tidak selaras dengan kebijakan dan pandangn politik luar negeri Indonesia secara bebas aktif. Strategi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional tidak terikat untuk bekerjasama dengan negara manapun selama kerjasama tersebut saling menguntungkan. Adanya komunitas pada lingkup Asia-Pasifik ini memberikan peluang kepada negara Indonesia dalam kerjasama untuk melakukan penanggulangan bahaya penyebaran pandemi Covid-19. Dengan demikian upaya negara Indonesia dalam meningkatkan kewaspadaan nasional untuk menghadapi pandemi Covid-19 akan mampu memutus rantai penyebaran.
- 2) Asia Selatan. Ekspansi ekonomi Cina di kawasan Asia Selatan berimplikasi pada pelemahan kekuatan ekonomi bagi negara yang memiliki daya saing rendah. Kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) oleh negara Cina dan dominasi negara India di Asia Selatan, memberikan dampak pada persaingan ekonomi di wilayah Asia Selatan. Negara Indonesia yang juga memiliki kedekatan wilayah dengan Asia Selatan memiliki peluang dalam terlibat dengan kebijakan OBOR Cina dalam kerangka hubungan perdagangan antara negara. Kebijakan OBOR yang menjadi bagian dari peningkatan iklim perdagangan ini akan melibatkan para pelaku ekonomi. Dengan demikian adanya kebijakan OBOR Cina ini memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk dapat meningkatkan daya saing produk, sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional ini memberikan peluang dalam mendukung anggaran dalam meningkatkan penanganan bahaya pandemi Covid-19.

3) Asia Tenggara.

Pada awal kejadian penyebaran pandemi Covid-19, terdapat lima buah negara dengan kondisi jumlah kejadian tinggi untuk wilayah Asia Tenggara. Hasil pengetesan cepat (*Rapid Test*) untuk mendeteksi jumlah Covid-19, Indonesia masih terbatas, lebih dari 100.000 test.



Gambar 2.3 Pengujian Rapid Test Potensi Terjangkit Covid-19 ASEAN

Sumber: Pusparisa, 2020

Sementara negara Vietnam dan Malasysia telah melakukan pengetesan cepat lebih dari 200.000 test, sesuai gambar 2.2.⁴¹ Negara Singapura menjadi negara dengan jumlah kejadian terbanyak, disusul oleh Indonesia, Filipina, Malaysia dan Thailand. Kelima negara ASEAN tersebut mencatat total kasus infeksi sebanyak 47.887 kasus dengan korban meninggal adalah sebanyak 1.628 orang, sementara pasien yang terpapar dan berhasil sembuh sebesar 11.589 orang sesuai tabel 2.1.⁴²

Dengan melihat pada data penyebaran Covid-19 di kawasan ASEAN, negara-negara melakukan kerjasama untuk memutus penularan antar negara dengan mengurangi kunjungan baik lewat

⁴¹Detik, Tim. 2020. Lega Pemerintah Indonesia Grafik Tambahan Kasus Corona Relatif Rendah. Detik, Jakarta. Detik.Com, <Https://News.Detik.Com/Berita/D-5007954/Lega-Pemerintah-Indonesia-Grafik-Tambahan-Kasus-Corona-Relatif-Rendah/3>

⁴² Rizal, Jawahir Gustav. 2020. Update Virus Corona Di ASEAN: Singapura Kasus Tertinggi, Malaysia Terbanyak Sembuh. Kompas, Jakarta, Kompas.Com. <Https://Ww.Kompas.Com/Tren/Read/2020/05/03/203213565/Update-Virus-Corona-Di-Asean-Singapura-Kasus-Tertinggi-Malaysia-Terbanyak>.

laut maupun udara. Kerjasama untuk melawan penyebaran Covid-19, telah terjalin kerjasama antara para menteri luar negeri se-Asia Tenggara dan Republik Rakyat China saat pertemuan khusus di Laos. Pada menteri luar negeri negara-negara ASEAN sepakat untuk bertukar informasi untuk saling membantu penyebaran Covid-19. Data perkembangan Covid-19 tingkat ASEAN, berdasarkan data per 3 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

- Indonesia (1.677.274 orang positif, 45.796 orang meninggal, 1.530.718 orang sembuh)
- Filipina (1.054.983 positif, 17.431 meninggal, 966.080 sembuh)
- Malaysia (415.012 positif, 1.533 meninggal, 383.140 sembuh)
- Myanmar (142.838 positif, 6 meninggal, 159 sembuh)
- Thailand (68.984 positif, 245 meninggal, 39.481 sembuh)
- Singapura (61.218 positif, 31 meninggal, 60.786 sembuh)
- Kamboja (14.520 positif, 103 meninggal, 5.369 sembuh)
- Vietnam (2.942 positif, 35 meninggal, 2.549 sembuh)
- Laos (933 positif, 0 meninggal, 51 sembuh)
- Brunei (227 positif, 3 meninggal, 218 sembuh)

Dampak penyebaran Covid-19 terhadap di kawasan ASEAN menurunkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Negara terdampak Covid-19 adalah negara Singapura dengan pertumbuhan -2 persen, dikuti negara Filipina sebesar -0.2 persen. Sementara negara Indonesia masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen.⁴³

Adanya peningkatan angka penyebaran pandemi Covid-19 di antara negara-negara anggota ASEAN ini memberikan peluang dalam mendukung kerjasama antara negara anggota untuk

⁴³ Citradi, Tirta. 2020. Ekonomi RI & ASEAN Babak Belur Dihajar Corona, Q2 Lebih Ngeri. CNBC. Jakarta. CNBC Indonesia, <Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20200508062652-4-156990/Ekonomi-Ri-Asean-Babak-Belur-Dihajar-Corona-Q2-Lebih-Ngeri/2>

mencegah berkembangnya pandemi Covid-19. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan: (1) saling memberikan pertukaran informasi langkah strategis dalam pencegahan pandemi Covid-19 dan (2) memberikan bantuan berupa peralatan kesehatan dan obat-obatan untuk meningkatkan angka kesembuhan bagi pasien terdampak.

c. Nasional

- 1) Aspek Geografi. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah yurisdiksi nasional 6,4 juta km², dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau, luas perairan 5,8 juta kilometer, dengan panjang garis pantai (*base line*) 108.000 kilometer dan terletak di posisi silang dunia di antara dua benua dan dua samudera yang membentang di sepanjang katulistiwa (95° BT - 141° BT).⁴⁴ Kondisi ini kalau tidak diikuti dengan peningkatan kewaspadaan nasional akan berdampak pada kendala dalam penanganan bahaya pandemi Covid-19.
- 2) Aspek Demografi. Perkiraan pertumbuhan pendudukan yang tidak terkendali yang diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 berjumlah 247,623 Juta, tahun 2020 berjumlah 259,721 juta jiwa dan tahun 2025 berjumlah 270,538 jiwa.⁴⁵ Apabila tidak dikelola secara baik, maka jumlah penduduk yang besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah dalam peningkatan kesadaran dalam mentaati protokol kesehatan sebagai bagian dari kewaspadaan nasional dalam hal pencegahan terhadap bahaya pandemi Covid-19.
- 3) Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA). Untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut tidak cukup hanya jumlah potensi

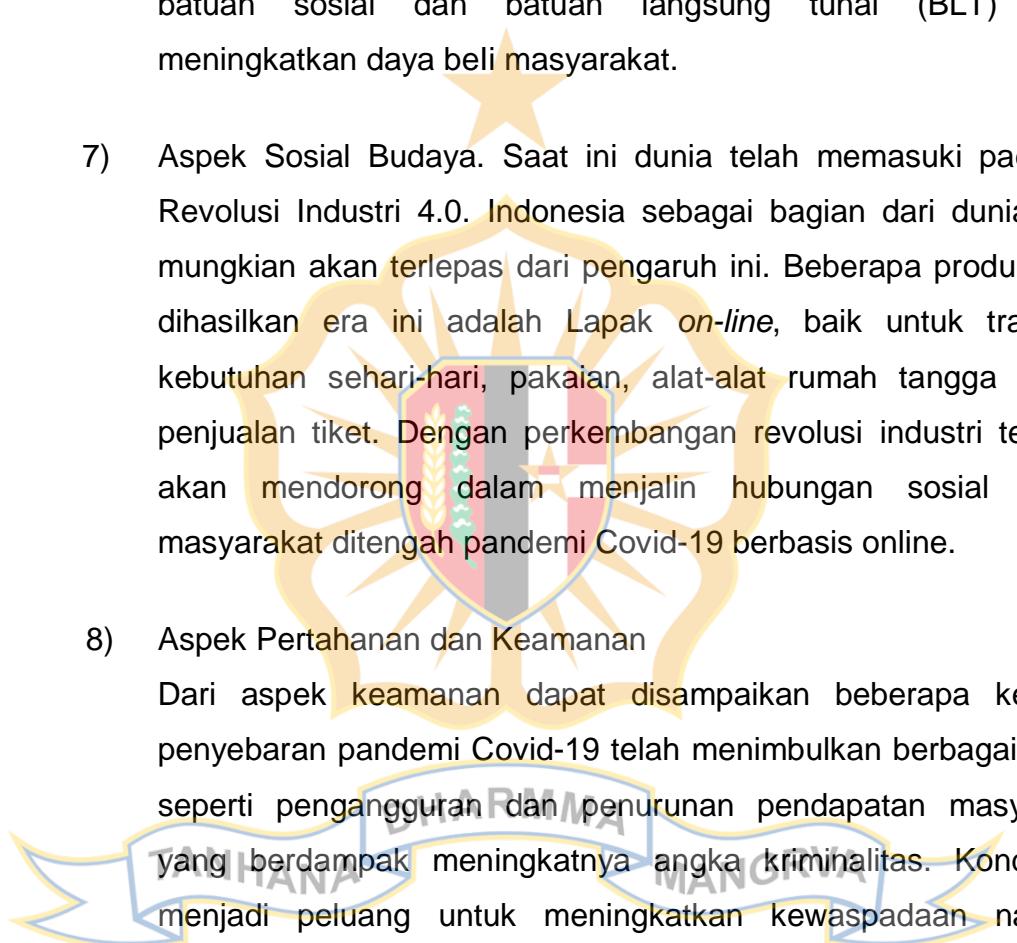
⁴⁴ Kemenko Maritim; Kapushidrosal Dan Kabadan Info Geospasial. Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayah RI. Tanggal 10 Agustus 2018

⁴⁵ Bappenas, 2008, Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) Tahun 2005 S.D 2025, Hal 31.

yang dimiliki bangsa, namun memerlukan modal, pengetahuan dan teknologi serta profesional. Besarannya potensi SKA ini dapat dikelola untuk menjadi nilai tambah bagi pendapatan negara untuk mendukung anggaran dalam penanganan bahaya pandemi Covid-19, sebagai bagian dari kewaspadaan nasional dari aspek penanggulangan bahaya.

- 4) Aspek Ideologi. Seiring dengan era reformasi dan kurangnya kesadaran akan ideologi, ditenggarai mulai adanya upaya untuk menghidupkan kembali perilaku kelompok-kelompok yang mempertanyakan kembali Pancasila sebagai ideologi yang relevan untuk bangsa Indonesia. Sebagai dampak dari adanya kelompok masyarakat untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama akan menjadi kendala dalam meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19.
- 5) Aspek Politik. Hubungan luar negeri dan kerja sama internasional pun sangat ditentukan oleh keputusan politik negara. Situasi terkini penyebaran pandemi Covid-19 ini, Negara Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan berbagai Negara lain yang memiliki kualitas untuk memproduksi Vaksin Covid-19, sehingga Indonesia mampu mengadakan Vaksin tersebut untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi penyebaran bahaya Covid-19. Adanya keputusan pemerintah yang didukung oleh iklim politik nasional yang stabil akan mampu meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19.
- 6) Aspek Ekonomi. Situasi ekonomi Indonesia tidak lepas dari stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mengalami penurunan akibat penyebaran Covid-19 dengan adanya *sosial distancing*, *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 tersebut memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar kurang dari 1 persen serta bertambahnya tingkat

kemiskinan sebesar 12,4 persen atau setara dengan 33,2 juta penduduk.⁴⁶ Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maka pemerintah perlu untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha agar mampu meningkatkan pendapatan melalui berbagai paket kebijakan seperti: penurunan angka pajak, pemberian insertif bagi pelaku usaha UMKM, dan pemberian batuan sosial dan batuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

- 
- 7) Aspek Sosial Budaya. Saat ini dunia telah memasuki pada era Revolusi Industri 4.0. Indonesia sebagai bagian dari dunia tidak mungkin akan terlepas dari pengaruh ini. Beberapa produk yang dihasilkan era ini adalah Lapak *on-line*, baik untuk transaksi kebutuhan sehari-hari, pakaian, alat-alat rumah tangga hingga penjualan tiket. Dengan perkembangan revolusi industri tersebut akan mendorong dalam menjalin hubungan sosial antara masyarakat ditengah pandemi Covid-19 berbasis online.
 - 8) Aspek Pertahanan dan Keamanan
Dari aspek keamanan dapat disampaikan beberapa kejadian penyebaran pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai aspek seperti pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak meningkatnya angka kriminalitas. Kondisi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi dampak negatif bahaya pandemi yang dapat menurunkan keselamatan bangsa.

⁴⁶ Jayani, Dwi Hadya. 2020. Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19. Katadata. Jakarta, Katadata.Co.Id, <Https://Katadata.Co.Id/Infografik/2020/05/01/Ancaman-Kemiskinan-Akibat-Krisis-Covid-19>.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pentingnya peningkatan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 ini dilakukan untuk mendeteksi dini, pencegahan dan penanggulangan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga mampu memutus rantai penyebaran. Pada beberapa hal, berlum terwujudnya peningkatan kewaspadaan nasional memberikan dampak belum belum optimalnya sinergi antara beberapa institusi seperti Satgas Covid-19, TNI, Kementerian, LPNK, Polri dan Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Belum optimalnya sinergi dalam meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparatur di daerah terhadap peraturan penanganan Covid-19, sehingga berdampak pada kebijakan di daerah yang tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi yang diharapkan adalah adanya peningkatan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi penyebaran pandemi Covid-19 akan memberikan dampak pada kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter. Tata kelola antara lembaga dalam meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 sangat penting bagi efektifitas pemutusan penyebaran Covid-19. Untuk meningkatkan efektifitas kewaspadaan nasional dalam penanganan Covid-19 dapat dilakukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini, pencegahan dini dan penanggulangan bahaya pandemi Covid-19.

13. Kondisi Kewaspadaan Nasional Bahaya Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Bidang Ekonomi dan Kesehatan

Tingkat kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 relatif masih rendah. Rendahnya kewaspadaan

bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 ini diindikasikan dengan beberapa hal. **Pertama**, dalam kemampuan deteksi dini, kemampuan analisis aparatur pemerintah belum mampu mendeteksi akan potensi bahaya pandemi Covid-19, sehingga virus Covid-19 dapat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia secara masif yang telah menimbulkan banyak angka kematian. **Kedua**, dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran juga belum memberikan hasil yang optimal. Sebagai dampak dari rendahnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 ini, memberikan pengaruh belum optimalnya sinergi antara lembaga pemerintah dalam mendukung sarana kesehatan, obat-obatan, kemampuan tester terhadap orang yang diindikasikan telah terpapar virus Covid-19, relatif masih rendah. **Ketiga**, adanya kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2020, yang disebabkan belum adanya penutupan *border* dari masuknya WNA dari luar negeri, sehingga menyebabkan adanya penularan virus penyakit kepada warga Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu melakukan pencegahan terhadap masuknya bahaya pandemi Covid-19.

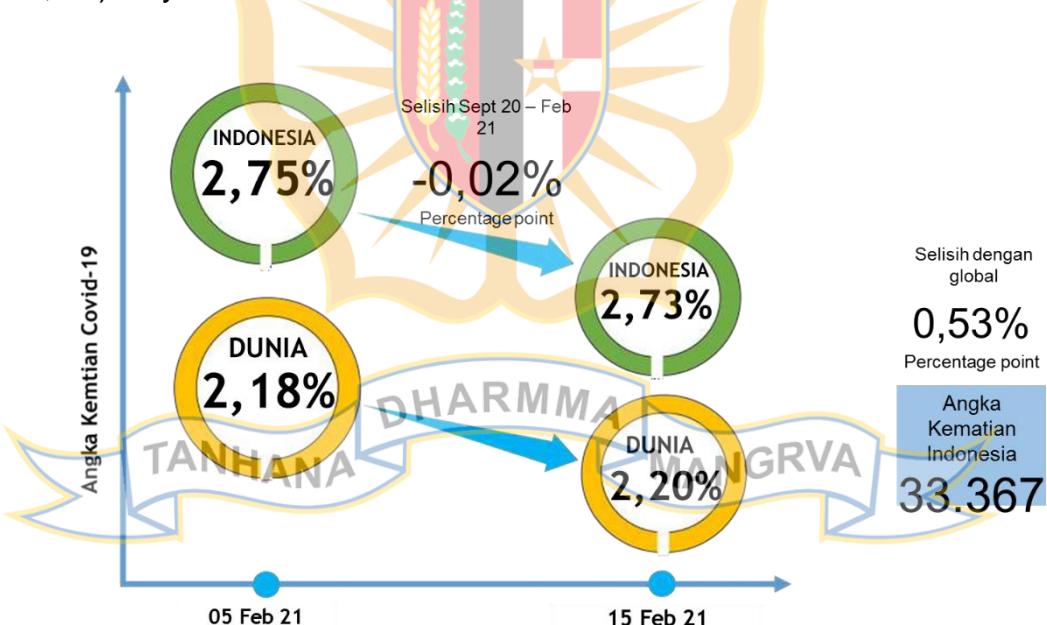
Dari kejadian penyebaran Covid-19 tersebut juga mengindikasikan bahwa kondisi kewaspadaan masyarakat Indonesia juga rendah. Hal ini dapat diuraikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak memiliki kewaspadaan dini terhadap bahaya virus Covid-19. **Pertama**, bahwa sebagian masyarakat berpendapat bahwa Covid-19 tidak bisa berkembang menular di negara yang memiliki cuaca panas seperti Indonesia. **Kedua**, beberapa anggota masyarakat juga memiliki pemikiran bahwa warga Indonesia memiliki kekebalan alamiah karena sering mengkonsumsi rempah-rempah, sehingga tidak mudah terjangkit penyakit Covid 19.⁴⁷ Sebagai dampak dari kedua pemikiran tersebut, masyarakat kurang menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran pandemi Covid-19.

Disisi lain, dalam hal pencegahan pemerintah Indonesia masih memberikan ijin kepada pengusahan untuk melakukan kegiatan ekspor dan

⁴⁷ Rezkisari, Indira. 2020. Melawan Corona dengan Rempah-Rempah Tradisional. Republika. Jakarta, Republika.co.id, <https://republika.co.id/berita/q6khjy328/melawan-corona-dengan-rempahrempah-tradisional>

rekspor peralatan kesehatan seperti masker, alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dan *hand sanitizer* ke luar negeri. Kondisi ini tentu saja membuat ketiga barang tersebut menjadi langka pada saat presiden mengumumkan akan adanya warga Indonesia yang terjangkit Covid-19 sebagai pasien pertama dan kedua pada tanggal 2 Februari 2020.⁴⁸

Perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia per tanggal 5 Februari 2021 di Indonesia sebesar 15,57 persen lebih rendah dari angka penyebaran dunia sebesar 24,65 persen. Sementara angka kematian telah mencapai 2,75 persen lebih tinggi pertambahan dunia yang sebesar 2,18 persen. Sementara jumlah kematian di Indonesia adalah sebesar 33.367 korban.⁴⁹ Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menyebar ke berbagai wilayah Provinsi, dan telah menjangkiti lebih dari 1.65 juta orang. Penyebaran di Indonesia Covid-19 per 10 Februari 2021 telah menjangkiti 1.174.799 orang positif, 31.976 (2,7%) meninggal dan 973.452 (sekitar 82,9%) dinyatakan sembuh.⁵⁰



Gambar 3.1 Angka Penyebaran Covid-19
Sumber: BNPB (2021)

⁴⁸ Widhana, Dieqy Hasbi. 2020. Riwayat Perjalanan Pasien Positif Corona COVID-19 di Indonesia. Trito, Jakarta, Trito.id, <https://trito.id/riwayat-perjalanan-pasien-positif-corona-covid-19-di-indonesia-eCn3>

⁴⁹ BNPB. 2021. Penyebaran penderita Covid-19. Jakarta.

⁵⁰ Mahbub Ridho Maulana. 2021. Virus Corona di Indonesia per 9 Februari 2021, Pasien Sembuh Kembali Anjlok dan Kasus Kematian Naik. Pkiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011406700/update-virus-corona-di-indonesia-per-9-februari-2021-pasien-sembuh-kembali-anjlok-dan-kasus-kematian-naik>.

Tingginya angka penyebaran pandemi Covid-19 merupakan indikator bahwa bangsa Indonesia belum memiliki tingkat kewaspadaan nasional yang tangguh. Dengan demikian diperlukan peningkatan kewaspadaan nasional untuk menghadapi pandemi Covid-19 untuk meningkatkan keselamatan bangsa. Sebagai dampak dari rendahnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap penurunan aspek ekonomi dan aspek kesehatan.

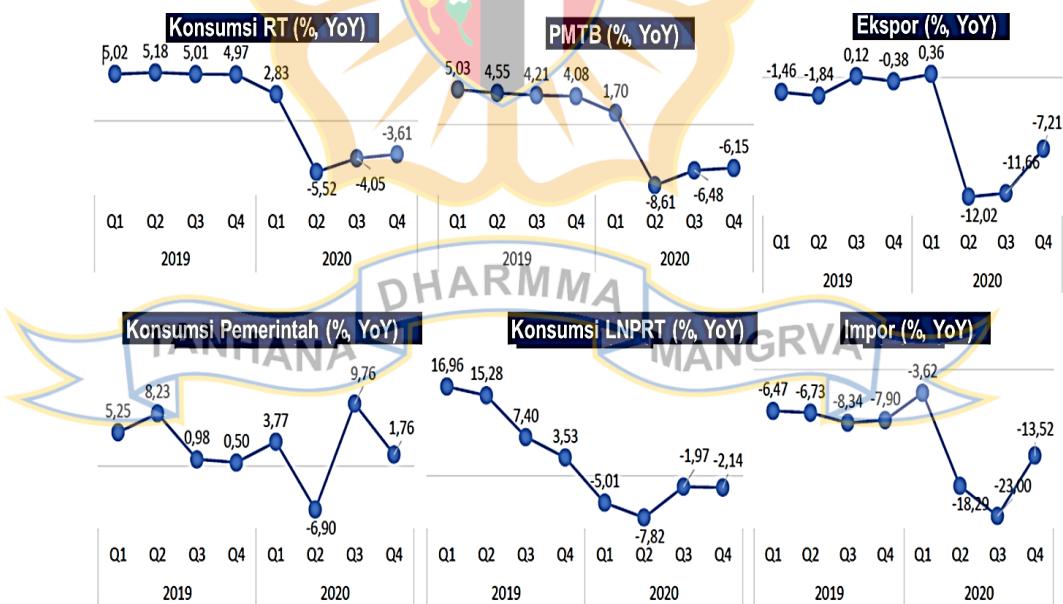
a. Dampak Kewaspadaan Nasional Pada Bahaya Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi

Sebagai dampak rendahnya kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam melakukan pencegahan dan kemampuan penanganan pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata angka penyebaran Covid-19 dunia. Kondisi tersebut telah memberikan dampak pada berbagai penurunan dari perekonomian di Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 sangat cepat, bahkan di seluruh negara. Sejauh ini, telah lebih dari 200 negara telah terpapar virus Corona.⁵¹ Penyebaran virus Covid-19 yang telah menyebar ke berbagai pelosok dunia memberi pengaruh terhadap perekonomian nasional Indonesia, baik dari segi perdagangan, pariwisata. Dari aspek ekonomi, Covid-19 telah melemahkan pendapatan negara dari sektor cukai perdagangan. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pentaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan seperti penggunaan penutup hidung dan mulut (masker), sabun tangan, menjaga jarak, dan menjaga jarak dengan orang lain, tidak dapat disangkal masih sangat rendah. Sebagian besar orang berpendapat bahwa kegiatan sosial dan ekonomi dalam masyarakat adalah tanda berakhirnya wabah tersebut.⁵²

⁵¹ Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Prekonomian Indonesia. Edupsycouns: Journal Of Education, Psychology And Counseling, 2(1), 146-153.

⁵² Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 1(2), 68-84.

Bila dilihat dari 6 bidang perekonomian dapat dilihat terjadi penurunan pada perhitungan data penurunan (YoY) pada bidang **Konsumsi Rumah Tangga** pada Quartal 2-2020 terjadi penurunan sebesar minus 5,52 persen dari pertumbuhan Quartal 2-2019 sebesar 5,18 persen, **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** pada Quartal 2-2020 terjadi penurunan sebesar minus 8,61 persen dari pertumbuhan Quartal 2-2019 sebesar 4,55 persen, **Ekspor** pada Quartal 2-2020 terjadi penurunan sebesar minus 12,02 persen dari pertumbuhan Quartal 2-2019 sebesar minus 1,84 persen, **Konsumsi Pemerintah** pada Quartal 2-2020 terjadi penurunan sebesar minus 6,90 persen dari pertumbuhan Quartal 2-2019 sebesar 8,23 persen, **Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Mengurusi Rumah Tangga (LNPRT)** pada Quartal 2-2020 terjadi penurunan sebesar minus 7,82 persen dari pertumbuhan Quartal 2-2019 sebesar 15,28 persen dan **Impor** pada Quartal 2-2020 terjadi penurunan sebesar minus 18,29 persen dari pertumbuhan Quartal 2-2019 sebesar minus 6,73 persen.



Gambar 3.2 Pertumbuhan Perekonomian Nasional
Sumber: BPS, 2021

Dalam kasus ini, pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi semua ancaman yang pernah dan akan

ditimbulkan oleh Covid-19. Waspada bukan berarti ketakutan atau pesimis yang berlebihan terhadap keadaan sekarang, tetapi lebih waspada dan menimbulkan ancaman sebagai sesuatu yang dapat berlaku pada saat dimana dan dalam keadaan adanya bahaya.⁵³ Dengan memperkuat kewaspadaan nasional akan bahaya pandemi Covid-19, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,7 persen, menurut rencana pemerintah dengan fokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.⁵⁴ Dengan kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pertumbuhan PDB pada tingkat 4,7 persen. Peningkatan pertumbuhan perekonomian secara nasional diharapkan mampu memberikan pengaruh pada peningkatan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat kembali pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Adanya penurunan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja dan menurunnya usaha. Untuk meningkatkan pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan dengan langkah:

- 1) Meningkatkan daya beli melalui penguatan program bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
- 2) Menumbuhkan rasa aman dan membangun kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi-sosial melalui program vaksinasi.
- 3) Menyusun Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dengan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi.
- 4) Percepatan reformasi untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan daya saing, dan kondisi iklim investasi
- 5) Mengembangkan reformasi struktural melalui percepatan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

⁵³ Suryani, N. L. (2020). Covid 19 dan New Norma (L).

⁵⁴ Fika Nurul Ulya. 2021. Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Tumbuh 4,7 Persen. Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2021/06/20/090400726/tahun-2021-ekonomi-indonesia-diproyeksi-hanya-tumbuh-4-7-persen?page=all>.

- 6) Meningkatkan pemulihan ekspor didukung oleh membaiknya harga komoditas global dan permintaan global.

b. Dampak Kewaspadaan Nasional Pada Bahaya Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Masyarakat

Pandemi Covid-19 ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa dengan kesan yang jauh lebih buruk dari pada krisis politik dan keuangan 1998 yang pernah dihadapi Indonesia sebelumnya. Pandemi ini juga menjadi bagian dari ancaman tersendiri yang jauh lebih merusak sendi kehidupan bangsa. Peningkatan kewaspadaan nasional diharapkan dapat menghadapi bahaya wabah Covid-19 untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dengan memperkuat kesadaran nasional mengenai bahaya pandemi Covid-19, orang lebih mementingkan kesehatan. Meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengikuti protokol kesehatan semakin meningkat. Akibatnya sebagian besar tenaga kesehatan yang terpapar dan berisiko mati, saat penanggulangan pandemi ini, setiap orang mempunyai lebih banyak masa untuk beristirahat dan terdapat pembatasan pada waktu kerja untuk membuat tenaga kesehatan lebih banyak beristirahat, konsumsi makanan lebih sering dan berolah raga. Dalam aspek kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya latihan, yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang tepat.

Kondisi rendahnya kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam melakukan deteksi dini dan penanganan pandemi Covid-19 telah menyebabkan angka kematian dari pasien Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata angka kematian dunia. Kondisi tersebut telah memberikan dampak menurunnya angka kesehatan dan juga meningkatkan keterpakaian tempat tidur rumah sakit (*Bed occupancy rate*). Sebagai dampak dari pandemi Covid-19 telah menjadikan perubahan besar pada berbagai aspek kesehatan yang memberikan dampak negatif maupun positif.

- 1) Dampak Negatif. Berbagai dampak negatif dari penyebaran pandemi Covid-19.

Pertama, banyaknya rumah sakit yang kewalahan dalam menerima pasien Covid-19. Para dokter spesialis dari Kota Medan ini mengatakan rumah sakit yang merawat pasien Covid-19 kewalahan menampung pasien sampai saat ini. Akhirnya muncul keluhan masyarakat karena tak mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Ini berdampak pula terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian Doktor spesialis dari berbagai wilayah yang sedang melakukan perawatan pasien akibat terpapar Covid-19 merasa terharu untuk menampung pasien sampai saat ini. Adanya berbagai keluhan **terjadi** karena para pasien belum mendapat pelayanan kesehatan secara optimal. Ini juga memberi kesan kepada peningkatan morbiditi dan kematian akibat Covid-19.

Kedua, banyak tenaga kesehatan yang tertular. Para tenaga medis ini memiliki risiko cukup tinggi tertular virus Covid-19 jika tidak menggunakan peralatan APD yang sesuai dengan tingkat perlindungan dalam penanganan pasien Covid-19. **Ketiga**, banyak pasien non Covid-19 yang tidak berani untuk berobat. Para pasien Non-Covid-19 ini ikut merasa cemas. Seperti halnya para pasien yang berusia lanjut, pasien dengan berbagai penyakit kroniks seperti pasien hipertensi, penyakit paru kronis, diabetes melitus, penyakit jantung, autoimun, pasien cuci darah, dan pasien kemoterapi yang memerlukan pengobatan secara rutin jadi tidak berani datang berobat. Para pasien tersebut takut terpapar virus Covid-19. Hal ini dapat memberi kesan kepada pasien kronik yang biasa melakukan pengendalian rutin setiap bulan, tidak datang ke rumah sakit untuk mendapatkan obat bulanan sehingga penyakit mereka menjadi tidak terpantau, dan menyebabkan keluhan lain.

Keempat, Sebagian besar pasien Covid-19 berasa tertekan. Pasien Covid-19 juga merasa cemas, takut dan juga tertekan. Ketakutan ini mungkin disebabkan tidak adanya informasi yang

jelas atau kodisi pengasingan oleh warga sekitar, sehingga pasien tidak dapat bertemu keluarga sendiri, menyebabkan tidak mengikuti protokol kesehatan, sehingga tidak merasa yakin karena adanya stigma penyakit ini muncul sebuah aib. Bahkan ada laporan mengenai pasien Covid-19 yang mencoba bunuh diri akibat kecemasan. Adanya pekerja kesehatan yang juga takut dan cemas. Tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada pasien, tetapi juga keluarga mereka. Karena tenaga kesehatan juga mempunyai keluarga yang perlu dilindungi. Belum lagi jumlah tenaga kesehatan yang positif dan meninggal, ini menambah kecemasan tenaga kesehatan. Tekanan juga sering timbul kerana beban kerja yang berat di ruang isolasi penderita Covid-19. **Kelima**, adanya Stigma buruk ke tenaga kesehatan. Banyak masyarakat yang memandang negatif bahwa tenaga kesehatan sebagai pembawa virus karena merawat pasien Covid-19.

2) Dampak Positif.

Meskipun pandemi Covid-19 telah memberikan pengaruh terhadap penurunan perekonomian nasional dan juga banyaknya korban yang meninggal. Akan tetapi apabila diteliti secara seksama, adanya dampak pandemi Covid-19 juga memberikan dampak positif terhadap dampak kesehatan. **Pertama**, akibat merebaknya pandemi Covid-19 berdampak pada masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan. Adanya kesadaran dan kedisiplinan rakyat Indonesia tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan menjaga protokol kesehatan semakin meningkat. **Kedua**, petugas kesehatan akan waspada. munculnya kecurigaan pada kalangan petugas kesehatan karena takut saling menularkan. Hal ini sebenarnya baik karena membuat petugas kesehatan lebih waspada dan melindungi diri. **Ketiga**, pada perkembangan penanganan pandemi kehidupan petugas kesehatan lebih tertata. Tidak seperti pada awal penyebaran

Covid-19, dimana tenaga kesehatan banyak yang kelelahan, kewalahan dan juga berakibat fatal karena meninggal akibat terpapar virus Covid-19. Hal tersebut disebabkan kondisi jumlah pasien Covid-19 yang bertambah secara cepat yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat. Sejak adanya program pemerintah dengan penambahan jumlah relawan kesehatan dan pengaturan jam kerja bagi tenaga kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19, maka tenaga kesehatan memiliki waktu istirahat yang cukup dan lebih teratur. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tenaga kesehatan mengalami kelelahan dan mencegah tertular virus Covid-19. Adanya pembatasan jam kerja dalam penanganan pasien Covid-19, membuat tenaga kesehatan memiliki waktu untuk beristirahat dan berolahraga secara teratur. **Keempat**, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolah raga. Kemunculan virus Covid-19 telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olah raga yang harus diikuti dengan protokol kesehatan yang benar. **Kelima**, para ilmuwan dari berbagai negara didorong untuk menemukan formulasi vaksin. Peneliti dan ilmuwan didorong untuk menemukan vaksin yang dapat menyebarkan terjadinya Covid-19.

14. Tata Kelola Peningkatan Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bahaya Pandemi Covid-19 Sebagai Bagian Dari Ancaman Nermiliter.

Penyebaran pandemi Covid-19 tidak pernah diprediksi dan diantisipasi karena kurangnya kemampuan kewaspadaan nasional untuk menganalisis dampak terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat. Sampai dengan awal Maret 2020, pemerintah dan masyarakat masih yakin bahwa bahaya pandemi Covid-19 tidak seperti yang dipikirkan sehingga telah mengubah perilaku di masyarakat. Dengan melihat dampak yang begitu masih terhadap kesehatan dan perekonomian nasional, maka diperlukan tata kelola dalam peningkatan kewaspadaan nasional. Untuk melakukan peningkatan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia diperlukan tata kelola secara

terstruktur dari pemerintah kepada aparatur dan kepada masyarakat, sehingga akan mampu membentuk suatu sinergi antara lembaga dan antar aparatur pemerintah dengan masyarakat. Peningkatan kewaspadaan nasional ini sangat penting untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap berbagai potensi yang dapat mengganggu keselamatan dan kedaulatan bangsa. Untuk mendukung tata kelola dalam peningkatan kewaspadaan nasional pada aspek penanggulangan bahaya pandemi Covid-19 diperlukan kebijakan, mekanisme pengendalian dan kesatuan informasi dari daerah ke pusat untuk meningkatkan keakuratan dalam pengambilan keputusan.

a. Kebijakan Tata Kelola Peningkatan Kewaspadaan Nasional Bahaya Pandemi Covid-19 Sebagai Bagian Dari Ancaman Nirmiliter

Dalam mendukung tata kelola peningkatan kewaspadaan nasional untuk menghadapi diperlukan kebijakan yang mengacu pada kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah. **Pertama**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Implementasi kebijakan dalam peningkatan kemampuan penanganan pandemi Covid-19 sebagai bagian dari kewaspadaan nasional didasarkan pada peraturan tentang karantina kesehatan, dengan tujuan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan implementasi kebijakan yang didasarkan pada peraturan tentang kekarantinaan kesehatan, pemerintah dapat melakukan pencegahan dini terhadap potensi masuknya penyakit dari luar Indonesia melalui pembatasan dan pencegahan masuknya barang atau orang ke wilayah Indonesia. Karantina kesehatan ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 dari luar masuk ke Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sangat tepat diterapkan untuk menangani penyebaran pandemi Covid-19. Dengan demikian pemahaman aparatur pemerintah dalam undang-undang ini akan berpengaruh terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus/Disease 2019 (Covid-19). Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid- 19, meningkatkan sinergi pembuatan kebijakan operasional, dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons Covid-19. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan terhadap ketaatan masyarakat untuk protokol kesehatan dan *sosial distancing*. Terkait dengan kegiatan *Sosial Distancing* merupakan cara yang efektif dalam menghambat penyebaran virus/penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Akan tetapi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kewaspadaan nasional, kebijakan *sosial distancing* belum memberikan dampak untuk mencegah terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 yang disebabkan kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu untuk mendukung kebijakan *Sosial Distancing* sebagai bagian dari upaya pencegahan diperlukan peran dari seluruh institusi pemerintah (TNI, polri, Satpol PP, Kepala Daerah, Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RW) untuk dapat memberikan sosialisasi dan pengawasan secara ketat terhadap kebijakan tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam bentuk *sosial distancing* yang dituangkan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Pemerintah juga perlu menjamin perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Tuntutan perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi dan kelelahan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah

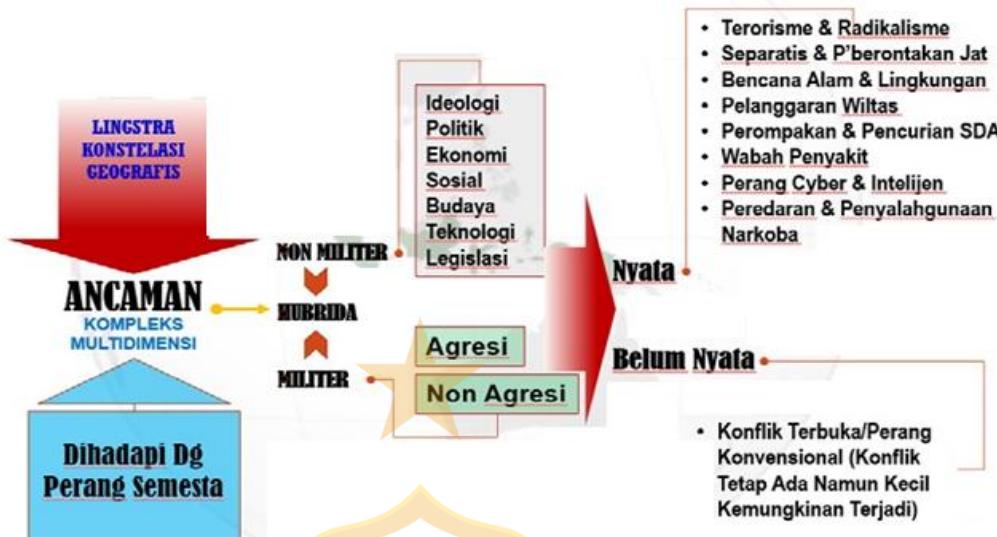
merupakan instrumen penting dalam menjamin keselamatan bangsa baik masyarakat maupun tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanggulangan bahaya pandemi Covid-19.

b. Pendekatan Pada Tata Kelola Peningkatan Kewaspadaan Nasional Berbasis Satu Informasi Data dan Mekanisme Pengedalian pada Bahaya Pandemi Covid-19.

Penanganan bahaya pandemi Covid-19 saat ini masih belum memberikan hasil signifikan, bahkan terjadi peningkatan penderita Covid-19 terutama pada masa liburan baik tahun baru maupun perayaan hari besar agama. Sesuai dengan data dan fakta yang ada saat ini bahwa berbagai anggota masyarakat termasuk karyawan dari sejumlah kementerian, lembaga, dan perusahaan swasta terinfeksi Covid-19. Kondisi ini menjadi potensi lebih buruk mengingat adanya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar dan patuh terhadap protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pentingnya meningkatkan kewaspadaan nasional mengingat bahwa negara Indonesia memiliki berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu keselamatan bangsa.⁵⁵ Bahaya pandemi Covid-19 merupakan bagian dari potensi ancaman nirmiliter yang dapat menyebar dan mengakibatkan terganggunya keselamatan bangsa. Dari aspek ancaman nirmiliter, pandemi pandemi Covid-19 merupakan bagian dari ancaman nirmiliter, sesuai gambar 3.3. Dalam merespons kompleksitas yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, dan berbagai kendala dalam penerapan kebijakan pemerintah mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kebisaan Baru (*New Normal*), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan PPKM Darurat di Provinsi Jawa dan Bali, sering terjadi menimbulkan pertentangan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut yang mendasarkan pada pendekatan ekonomi (*Economic Approach*)

⁵⁵ Royanto, Joko. 2017. Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional. Wira. 67 (51), 6-13

dan pendekatan kesehatan (*Health Security Approach*), pemerintah perlu untuk mengedepankan berbagai prinsip kewaspadaan nasional.



Gambar 3.3. Potensi Ancaman Terhadap Keselamatan Bangsa

Sumber: Riyanto (2017)

Untuk mendukung peningkatan kewaspadaan nasional dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan pendekatan penanganan berbasis satu data informasi yang akurat, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menanggulangi bahaya pandemi Covid-19 secara tepat.

1) Peningkatan Kewaspadaan Nasional Melalui Kesatuan Informasi Pada Penanggulangan Bahaya Covid-19.

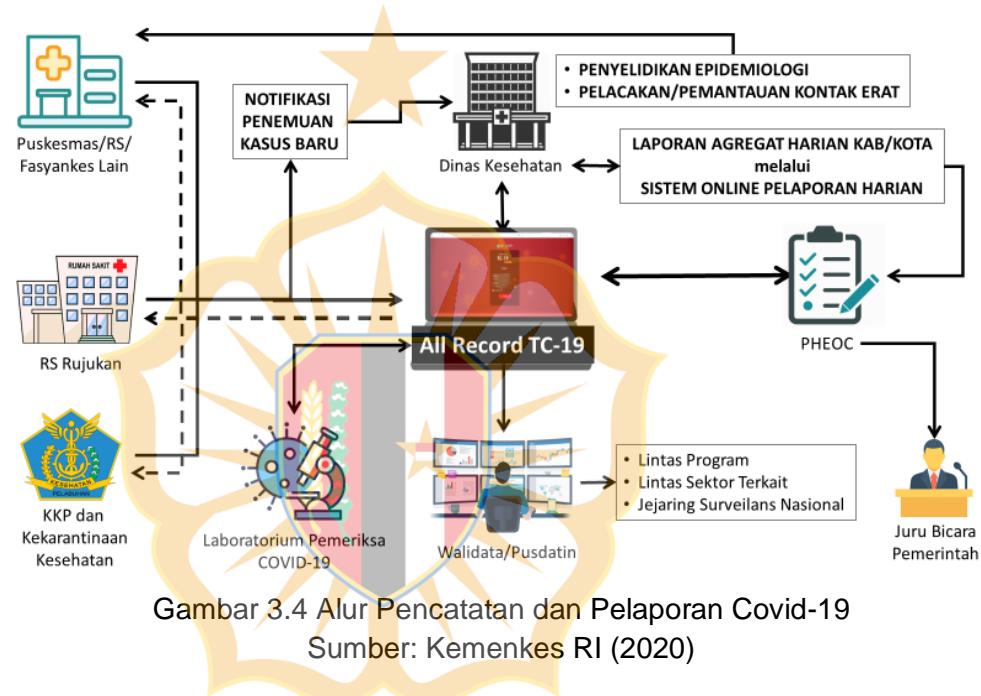
Tata Kelola informasi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diharapkan adalah adanya jaringan informasi antara Satuan Tugas Covid-19, intitusi terkait (TNI, Polri, pemerintah daerah) dan institusi lain dalam pemutusan penyebaran Covid-19 secara tepat dalam memberikan informasi terhadap kejadian penyebaran Covid-19, sehingga penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan secara komprehensif. Adanya informasi berbagai tingkat penyebaran Covid-19 yang termonitor pada suatu wilayah yang telah tertangani oleh lembaga kesehatan (Puskesmas, RS, Klinik, dan Fasyankes lain) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, baik dari kunjungan pasien atau hasil penelusuran kontak erat, harus dicatat dan dilaporkan

dalam formulir notifikasi penemuan kasus Covid-19 secara akurat. Dalam tata kelola informasi, variabel yang harus dilengkapi saat mencatat notifikasi penemuan kasus adalah: Nama, NIK, Umur, Jenis Kelamin, Alamat Domisili 14 hari terakhir (lengkap dengan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota), Nomor kontak seluler yang dapat dihubungi, tanggal onset (muncul gejala), gejala terkait Covid-19, Riwayat (kontak/perjalanan/tidak ada), kondisi penyerta, status epidemiologi (suspek/ probable/ konfirmasi), tindakan (rujuk/rawat/ isolasi mandiri).⁵⁶ Variabel alamat domisili juga diperlukan untuk men-*tracing* pada kegiatan selama periode waktu 14 hari terakhir. Variabel ini penting untuk dilengkapi karena menjadi dasar penentuan lokasi asal ditemukannya kasus, dan berkaitan dengan area fokus penyelidikan epidemiologi.

Bagi Rumah Sakit yang sudah terdaftar ke dalam Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online, maka data kasus juga diinput ke dalam aplikasi tersebut sesuai ketentuan pelayanan di rumah sakit. Bagi Fasyankes yang melakukan pengambilan spesimen, setelah mencatat data diatas harus melakukan input melalui aplikasi pelaporan secara online *All Record Tracing Covid-19* (TC-19). Formulir notifikasi penemuan kasus tersebut selanjutnya dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk direkap dan ditindaklanjuti. Dinas Kesehatan juga dapat melihat notifikasi penemuan kasus terkait kasus yang dikirim spesimennya melalui aplikasi *online All Record TC-19* menggunakan akun Dinas Kesehatan. Bila kasus merupakan kontak erat yang harus dipantau, maka dilanjutkan dengan pelaporan pemantauan kontak erat. Sedangkan bila kasus merupakan kasus suspek, *probable* atau konfirmasi yang perlu dilakukan penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak, maka dilanjutkan dengan pelaporan penyelidikan epidemiologi.

⁵⁶ Anung Sugihantono, dkk. (2020). Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Jakarta. Kemenkes RI.

Untuk kasus yang harus dirujuk ke Fasyankes lain, pada formulir notifikasi harus mencantumkan tanggal merujuk dan fasyankes rujukan yang dituju untuk menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Bagi fasyankes yang memiliki akses ke aplikasi *online*, data kasus yang akan dirujuk harus dipastikan sudah diinput ke dalam aplikasi SIRS-*Online* atau *All Record TC-19* untuk memudahkan pelacakan riwayat pelayanan kesehatan bagi kasus yang bersangkutan.



Gambar 3.4 Alur Pencatatan dan Pelaporan Covid-19

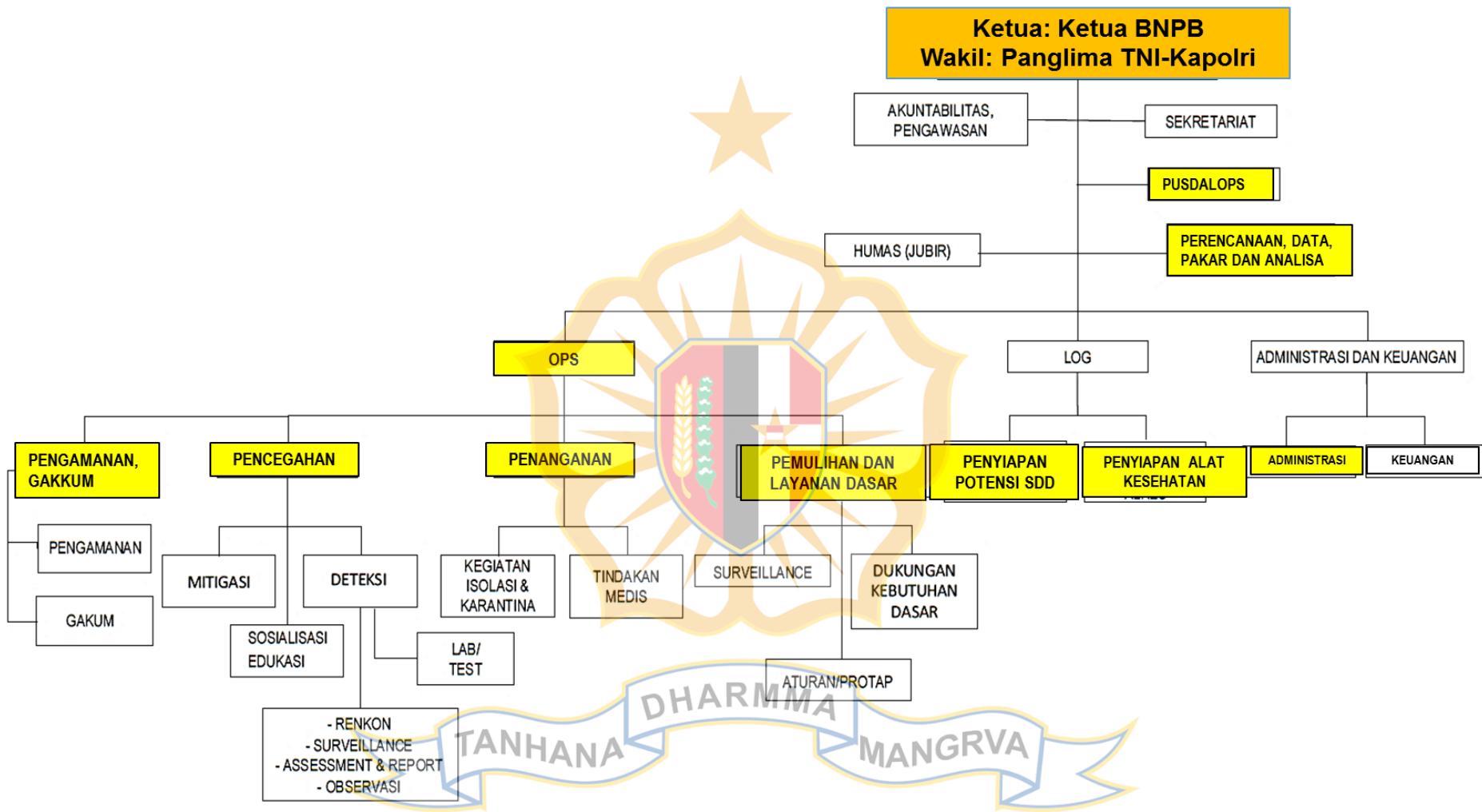
Sumber: Kemenkes RI (2020)

Dalam tata kelola alur informasi penyampaian data kejadian penyebaran Covid-19 yang diharapkan dapat membantu penanganan penyebaran Covid-19 lebih lanjut. Data informasi terkait kondisi dicurigainya dan/atau ditemukannya kasus positif Covid-19 misalnya maka akan didapat informasi tentang lokasi, waktu kejadian, data pasien, status pasien, *contact tracing* dan *colour code* wilayah. Hal ini agar dapat diakses oleh institusi terkait untuk memudahkan penanganan Covid-19. Dengan adanya tata kelola informasi yang tepat dan akurat akan dapat disusun penanganan Covid-19 sehingga memberikan kontribusi bagi pemutusan penyebaran, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pemulihian ekonomi secara cepat.

2) Peningkatan Kewaspadaan Nasional Melalui Mekanisme Pengendalian Pada Penanggulangan Bahaya Covid-19.

Mekanisme pengendalian penanganan bahaya pandemi Covid-19 yang diharapkan adalah terwujudnya pengendalian secara teratur dari tingkat pusat sampai daerah. Untuk dapat mewujudkan pengendalian dalam penanganan Covid-19 diperlukan struktur organisasi yang tertata sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Tersusunnya mekanisme komando dan pengendalian dalam penanganan penyebaran Covid-19 akan memberikan dampak langkah yang diperlukan untuk penanganan Covid 19, ketepatan alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; serta terwujudnya efektifitas Gugus Tugas dalam penanganan Covid 19. Adanya mekanisme yang tersusun dengan teratur akan memberikan dampak penanganan Covid 19 di lapangan secara akurat.

Terwujudnya mekanisme pengendalian penyebaran Covid-19 yang tertata dengan baik pada posisi masing-masing elemen dalam penanganan Covid 19, baik pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah daerah serta TNI, sehingga tugas dalam percepatan penanganan Covid-19 akan dapat diwujudkan dengan optimal. Dalam struktur organisasi pengendalian penanganan pandemi Covid-19, tugas dan fungsi institusi terkait dan juga Instansi terkait lainnya diharapkan dapat berjalan secara sinergi. Dalam mekanisme pengendalian ini diharapkan akan mampu melakukan antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19. Pengendalian penanganan Covid-19 perlu dilakukan pemetaan dan pengukuran seberapa tinggi kasus Covid-19 dengan menghitung angka serta kecepatan *incident rate*, yaitu perhitungan jumlah kasus baru yang terjadi di suatu lingkup penduduk. Angka ini mengukur seberapa tinggi dan cepatnya kasus baru terjadi pada pengendalian ketat berskala lokal.



Gambar 3.5 Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas Nasional

Sumber: Penjabaran Keppres RI No 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres No 7 Tahun 2020

15. Langkah Strategi Peningkatan Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bahaya Pandemi Covid-19 sebagai bagian Dari Ancaman Nirmiliter.

Diperlukan berbagai langkah strategi dalam meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai potensi ancaman. Menurut Kelompok Kerja Lemhannas (2021) bahwa kewaspadaan nasional adalah suatu sikap yang memiliki keterkaitan dengan rasa cinta tanah air (Nasionalisme) yang ditumbuhkembangkan dari kepedulian dan tanggungjawab dari seluruh warga negara Indonesia dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Kualitas kesiapsiagaan ini meliputi kemampuan untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai potensi ancaman yang akan mengganggu keselamatan bangsa dan negara. Terkait dengan peningkatan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19, memiliki keterkaitan terhadap rendahnya kedaulatan bangsa apabila dalam penanganan dan penanggulangan bahaya pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia kurang mampu untuk meyediakan sarana kesehatan, peralatan pelindung diri (APD), obat-obatan dan vaksin dari dalam negeri. Kondisi rendahnya kemampuan dalam penanganan dan penanggulangan bahaya pandemi Covid-19 ini akan menjadikan ketergantungan bangsa Indonesia terhadap produk bangsa lain.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, meskipun cukup lengkap, komprehensif dan terstrukturnya kerangka regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam merespon kejadian bencana wabah pandemi Covid-19 baik di tingkat nasional maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, untuk mendukung pencegahan pandemi Covid-19. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kerangka regulasi dalam berbagai tingkatan administrasi pemerintahan, diperlukan adanya pemetaan secara menyeluruh, terutama yang terkait dengan pemberlakuan PSBB, larangan mudik/pulang kampung, PPKM skala Mikro dan PPKM Darurat dilaksanakan di beberapa kawasan dan kawasan yang telah dikategorikan sebagai zona merah. Pemetaan dalam kerangka pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksana

untuk menangani pandemi Covid-19 diperlukan tidak hanya untuk mencegah penyebaran dan pengembangan rantai penularan pandemi Covid-19 di tingkat nasional atau wilayah, tetapi juga dalam menyiapkan penegasan agar semua kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mencari cara untuk mencegah, serta mencari langkah yang tepat dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat secara luas.

Secara institusi, pembentukan Tim Petugas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat nasional melalui Keputusan Presiden 09/2020 hingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat RT / RW, menunjukkan bahwa pengendalian pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan secara sektoral, tetapi harus diselaraskan di seluruh institusi dan di antara pelaku. Oleh itu, berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19 secara partisipatif, dengan peran serta seluruh masyarakat setempat, sangat diperlukan untuk memperkuatnya, terutama dengan mendorong kerjasama pentahelix di antara pihak berkepentingan yang terlibat, seperti dari pemerintah (pusat dan unsur-unsur selevel), pihak swasta, dunia usaha, elemen akademisi, dan unsur masyarakat setempat. Dengan kondisi ini, berbagai elemen institusi dalam konteks perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk berbagai kelompok atau masyarakat yang telah dan / atau berpotensi tertular virus Covid-19 perlu dipetakan dan dinilai pengaruhnya. Seperti adanya Satuan Perlindungan masyarakat (Satlinmas), pertahanan sipil (Hansip), Taruna kesiapsiagaan bencana (Tagana), dan kader bencana desa (kader Destana), termasuk pembantu desa, organisasi pemuda dan PKK, perlu diikutkan dalam peran dan dukungan untuk meningkatkan daya tahan dan kesiapan masyarakat di tingkat daerah, desa / kelurahan dalam menghadapi wabah Covid-19.

Dalam mendukung kegiatan diperlukan anggaran dengan mempertimbangkan bahwa bencana pandemi Covid-19 adalah bencana nasional di sektor kesehatan, pemerintah pusat dan daerah perlu untuk menjalankan fungsi perintah guna penanganan yang sedang dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah, termasuk sumber dana dari APBN dan APBD provinsi, kabupaten / kota, termasuk anggaran desa. Dengan demikian ketersediaan

pembiayaan yang ada melalui belanja pemerintah, yang dihadapkan dengan berbagai krisis ekonomi dan keuangan negara yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, memerlukan dukungan daripada pelaku / pelaku non pemerintah untuk membantu kepada pembiayaan pengendalian Covid-19 pandemi di berbagai wilayah secara nasional dan antar bangsa, terutamanya di tingkat masyarakat.

a. Kendala Peningkatan Kewaspadaan nasional Terhadap Bahaya Pandemi Covid-19.

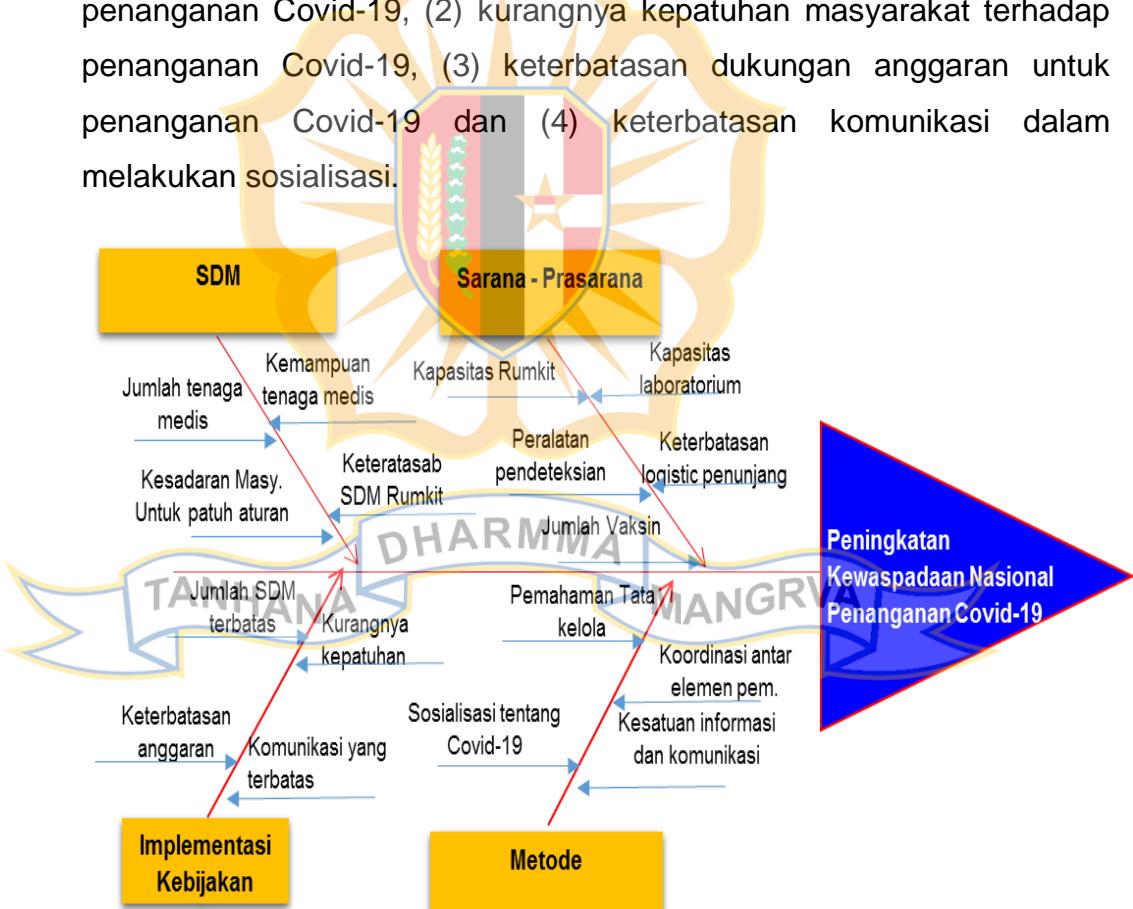
Untuk dapat meningkatkan kewaspadaan nasional sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan untuk menanggulangi penyebaran bahaya Covid-19, guna memutus rantai penyebaran dan meningkatkan pemulihian nasional ditemukan beberapa kendala. Berbagai kendala tersebut terkait dengan aspek SDM, sarana dan prasarana untuk menangani penyebaran pandemi Covid-19, Tata kelola antara lembaga (Metode) dan dukungan anggaran. Berbagai kendala yang telah ditunjukkan pada gambar 3.3 di atas dapat diuraikan antara lain:

Pertama, Aspek SDM yang disebabkan: (1) keterbatasan jumlah tenaga medis untuk menangani Covid-19 terutama untuk melakukan *tracing* terhadap korban Covid-19, (2) kemampuan dalam melaksanakan Test *Polymerase Chain Reaction* (PCR) terutama di Puskesmas, (3) keterbatasan jumlah SDM di rumah sakit yang belum merata di tiap wilayah di Indonesia, dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.

Kedua, Aspek sarana dan prasarana yang disebabkan: (1) kapasitas laboratorium dan rumah sakit yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, (2) kapasitas rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia yang belum merata, (3) keterbatasan logistik penunjang tatalaksana pasien Covid-19 dan alat pelindung diri (APD), (4) sarana peralatan untuk pengetesan Covid-19, (5) sarana pencegahan Covid-19 merupakan bahan impor, jadi terkendala dengan jumlah seperti jumlah vaksin.

Ketiga, aspek Metode (Tata lembaga) yang disebabkan oleh: (1) belum dipahaminya tata kelola penanganan Covid-19 oleh aparatur pemerintah, sehingga menimbulkan kurangsinkronan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, (2) kurangnya sosialisasi tentang bahaya Covid-19 di masyarakat, sehingga masyarakat kurang mentaati protokol kesehatan dan menganggap Covid-19 adalah aib dan merahasiakan kalau menjadi korban, (3) belum terkoordinasi antar elemen pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengendalikan penanganan Covid-19, (4) kurangnya kesatuan informasi dan komunikasi dalam penanganan Covid-19; dan

Keempat, Aspek Implementasi Kebijakan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan: (1) keterbatasan SDM dalam melakukan penanganan Covid-19, (2) kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap penanganan Covid-19, (3) keterbatasan dukungan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan (4) keterbatasan komunikasi dalam melakukan sosialisasi.



Gambar 3.6 *Fishbone* Penguatan Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi pandemi Covid-19

Untuk dapat meningkatkan kewaspadaan nasional dalam mendukung pemutusan rantai penyebaran pandemi Covid-19 untuk memulihkan perekonomian nasional diperlukan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam hal jumlah tenaga medis untuk melaksanakan *tracing* dan mengembangkan kemampuan SDM untuk mampu melakukan pengetesan secara cepat dan akurat terhadap korban Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
 - a) Menambah jumlah tenaga medis untuk menangani Covid-19 terutama untuk melakukan *tracing* terhadap korban Covid-19 dengan membuka relawan kesehatan.
 - b) Meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam melaksanakan Test *Polymerase Chain Reaction* (PCR) terutama di Puskesmas dan wilayah terpencil yang memiliki kemampuan terbatas.
 - c) Meningkatkan pemerataan jumlah SDM di rumah sakit di tiap wilayah di Indonesia, dan
 - d) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dengan melaksanakan pengawasan terutama di tempat publik seperti di kantor pemerintahan, pertokoan, pasar, rumah sakit, dan tempat perbankan.
- 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penanganan Covid-19 baik aspek peralatan medis maupun untuk pengobatan. Hal tersebut dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kemampuan laboratorium dan rumah sakit yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia.

- b) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan rumah sakit rujukan dalam penanganan Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia yang agar terjadi pemerataan.
 - c) Meningkatkan kemampuan dukungan logistik penunjang tata laksana pasien virus Covid-19 dan alat pelindung diri (APD), *hand sanitizer*, obat-obatan dan masker.
 - d) Meningkatkan ketersediaan sarana peralatan untuk pengetesan Covid-19 seperti test PCR, untuk mendeteksi korban yang terpapar Covid-19 secara cepat agar tidak menular ke orang lain.
 - e) Meningkatkan ketersediaan sarana pencegahan Covid-19 yang merupakan bahan impor, seperti jumlah vaksin dengan mengembangkan vaksin secara nasional.
- 3) Membangun Metode tata kelola dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut:
- a) Meningkatkan pemahaman kepada aparatur pemerintah yang tergabung dalam tim Satgas Covid-19 tingkat pusat dan daerah sampai pada tataran RT dan RW dalam tata kelola penanganan Covid-19, sehingga akan mampu meningkatkan sinergi guna menghentikan rantai penyebaran Covid-19.
 - b) Meningkatkan intensitas dan efektifitas informasi tentang bahaya virus Covid-19 di masyarakat, sehingga masyarakat akan mau mentaati protokol kesehatan dan mengimplementasikan dalam pergaulan di masyarakat luas guna mentaati kebijakan *Sosial Distancing* dan *Physical Distancing*.
 - c) Mewujudkan jalinan koordinasi antar elemen pemerintah dan pemerintah daerah guna mengendalikan penanganan Covid-

19, untuk meningkatkan keterpaduan guna penanganan pandemi Covid-19.

- d) Mewujudkan kesatuan informasi dan komunikasi dalam penanganan pandemi Covid-19 antara Satgas Covid-19 di daerah dan pusat, sehingga informasi yang diterima di tingkat pusat dan tingkat daerah memiliki keakuratan untuk selanjutnya dapat diambil kebijakan yang tepat dalam penanganan Covid-19.
- 4) Meningkatkan implementasi kebijakan dalam pengamanan pandemi Covid-19. Hal tersebut dilaksanakan dengan upaya sebagai berikut:
 - a) Mewujudkan kebijakan pemerintah dalam mendukung Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Era Normal Baru (New Normal), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada skala mikro dan PPKM Darurat untuk Provinsi Jawa dan Bali, dengan meningkatkan SDM dalam melakukan penanganan Covid-19.
 - b) Mewujudkan kepatuhan masyarakat terhadap penanganan Covid-19, sehingga masyarakat dapat melaksanakan protokol kesehatan dengan melakukan kebijakan menjaga jarak *Physical Distancing* dan *Sosial Distancing*.
 - c) Meningkatkan dukungan anggaran untuk penanganan Covid-19 terutama untuk mendukung peralatan kesehatan dan obat-obatan.
 - d) Meningkatkan keterpaduan informasi dan komunikasi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga mampu untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

b. Strategi Peningkatan Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bahaya Pandemi Covid-19

Strategi untuk meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 ini sangat diperlukan mengingat potensi acaman terhadap keselamatan bangsa akan terus ada sepanjang waktu. Untuk meningkatkan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia terkait dengan bahaya pandemi Covid-19 diperlukan beberapa langkah strategis yang meliputi:

1) Mewujudkan kemampuan deteksi terhadap bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman Nirmiliter. Untuk meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia dalam melakukan deteksi dini, maka aparatur pemerintah yang terkait, harus memiliki kemampuan dalam menganalisa berbagai fenomena yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Untuk mendukung strategi peningkatan kemampuan deteksi dini, maka pejabat Kepala BIN bersama Kepala BNPB dan Menteri Kesehatan perlu untuk melakukan berbagai langkah strategis yang meliputi:

- a) Melakukan peningkatan kewaspadaan nasional pada kemampuan deteksi dini aparatur pemerintah terkait (BNPB, BPBD, dan Kementerian/LPNK) terhadap berbagai ancaman bahaya nirmiliter khususnya bahaya pandemi Covid-19 dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintah. Dengan kemampuan deteksi dini ini akan meningkatkan kemampuan analisis terhadap potensi bahaya yang akan mengganggu keselamatan bangsa.
- b) Meningkatkan kemampuan analisa aparatur pemerintah (BIN, BNPB, Pemerintah Daerah) terhadap berbagai ancaman nirmiliter termasuk bahaya pandemi Covid-19. Kemampuan analisis ini akan ditindaklanjuti dengan kemampuan untuk menyusun cara bertindak dalam mencegah terjadinya bahaya yang akan mengganggu keselamatan bangsa.

- c) Penguatan program peningkatan kewaspadaan nasional. Peningkatan program kewaspadaan nasional ini diberikan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap lingkungan untuk tetap menjaga lingkungan tetap aman dari berbagai potensi bahaya.
- d) Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan nasional masyarakat dengan memberikan sosialisasi berbagai potensi ancaman baik secara lokal maupun nasional. Peningkatan kewaspadaan masyarakat akan mampu mendukung terwujudnya daya tangkal terhadap berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan bangsa.

2) Melakukan aksi *antisipasi* dini terhadap bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman Nirmiliter. Kemampuan kewaspadaan nasional dalam mendukung aksi antisipasi bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter dapat memberikan pencegahan awal bahaya pandemi Covid-19. Untuk mendukung strategi peningkatan kemampuan aksi antisipasi terhadap bahaya pandemi Covid-19, maka pejabat Kepala BNPB dan Menteri Kesehatan perlu untuk melakukan berbagai langkah strategis yang meliputi:

- a) Meningkatkan kewaspadaan nasional seluruh bangsa Indonesia melalui aksi mitigasi untuk menghadapi ancaman nirmiliter aspek pandemi Covid-19. Kegiatan mitigasi ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi dampak buruk dari penyebaran bahaya pandemi Covid-19.
- b) Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan melakukan kesiapsiagaan seluruh bangsa Indonesia terhadap bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter. Dengan demikian masyarakat sudah memiliki langkah yang

dapat diperbaik untuk menurunkan risiko terjadinya bahaya pandemi Covid-19.

- c) Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan melakukan identifikasi terhadap seluruh masyarakat yang terdampak, sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap berbagai bahaya terhadap keselamatan bangsa.
- d) Melakukan sosialisasi tentang kewaspadaan nasional terhadap masyarakat akan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung untuk menurunkan risiko bahaya. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh Pemerintah daerah dan pemerintahan desa tentang kewaspadaan nasional kepada masyarakat.
- e) Melakukan kerjasama dengan kelompok akademisi untuk menghasilkan langkah strategis dalam meningkatkan kewaspadaan nasional guna menghadapi ancaman nirmiliter termasuk didalamnya adalah pandemi Covid-19. Kajian dari kelompok akademisi ini dimaksudkan untuk mampu memitigasi risiko terjadinya bahaya pandemi Covid-19.

3) Melakukan pencegahan terhadap bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman Nirmiliter. Kemampuan kewaspadaan nasional dalam mendukung pencegahan berbagai ancaman nirmiliter pada aspek bahaya pandemi Covid-19 dapat melindungi keselamatan masyarakat. Untuk mendukung strategi pencegahan bahaya pandemi Covid-19, maka pejabat Kepala BNPB bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Daerah perlu melakukan berbagai langkah strategis yang meliputi: dilakukan dengan melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan mendorong tingkat kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman

nirmiliter. Peningkatan pencegahan terhadap bahaya pandemi Covid-19 ini dilakukan dengan meningkatkan keterpaduan antara BNPB, Kementerian/LPNK, institusi (TNI, Polri) dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter.

- b) Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai langkah strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bahaya pandemi Covid-19. Dengan demikian masyarakat memiliki risiko kecil akan dampak penyebaran virus Covid-19 untuk karakteristik/gejala berbagai potensi ancaman nirmiliter.
- c) Mendorong media massa untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan nasional guna menghadapi ancaman nirmiliter terutama bahaya pandemi Covid-19. Dengan peran media akan mempercepat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi risiko bahaya.
- d) Mewujudkan keterpaduan antar institusi dalam peningkatan kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19. Keterpaduan ini akan memberikan hasil yang optimal dalam mencegah dampak penyebaran pandemi Covid-19.

- 4) Melakukan penanggulangan terhadap bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman Nirmiliter.** Kemampuan kewaspadaan nasional dalam penanggulangan dan pemulihan dari dampak bahaya pandemi Covid-19 sebagai bagian dari ancaman nirmiliter dapat meningkatkan kondisi masyarakat pada kondisi normal. Untuk mendukung strategi penanggulangan pandemi Covid-19, maka Ketua Satgas Gugus Penanganan pandemi Covid-19 bersama Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan

Kepala Daerah untuk melakukan berbagai langkah strategis yang meliputi:

- a) Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan melakukan sinergi antara lembaga BNPB, Kementerian/LPNK, TNI dan Polri untuk menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter aspek bahaya pandemi Covid-19.
- b) Mewujudkan penanggulangan bahaya pandemi Covid-19 dengan meningkatkan kesatuan pengendalian dalam pencegahan ancaman nirmiliter. Kesatuan pengendalian bahaya pandemi Covid-19 ini akan mampu mengendalikan masyarakat agar mentaati peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti protokol kesehatan.
- c) Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan penanganan berbagai bahaya nirmiliter, termasuk pandemi Covid-19. Kemampuan teknologi informasi ini akan mempercepat dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada satu data terintegrasi.
- d) Meningkatkan kewaspadaan nasional dengan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak pasca terjadinya ancaman nirmiliter aspek pandemi Covid-19. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat pulih untuk mendukung kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Pengaruh Peningkatan Kewaspadaan Nasional Menghadapi Bahaya Covid-19 Terhadap Keselamatan Bangsa.

Pentingnya meningkatkan kewaspadaan nasional, baik sebagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah maupun sebagai kebiasaan dan perilaku hidup sehari-hari masyarakat. Peningkatan kewaspadaan oleh pemerintah dimaksudkan bahwa pemerintah selalu sigap dan tanggap dalam melakukan mitigasi dan

penanganan bencana melalui kebijakan yang konkret untuk melindungi masyarakat. Dalam konteks kebijakan, hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan tes secara berkelanjutan dan sesuai dengan standar internasional untuk memetakan sebaran Covid-19. Tes yang dilakukan harus tepat dan akurat. Apabila rapid test dianggap kurang akurat, pemerintah jangan sungkan untuk menggalakkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang dirasa jauh lebih akurat.

Dalam konteks masyarakat yang waspada, tanggung jawab dalam memitigasi dan menangani dampak pandemi ada pada elemen-elemen kunci dalam masyarakat beserta pranata-pranata tempat elemen kunci tersebut berada. Hal ini akan terkait erat, baik langsung maupun tidak, dengan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 dan kepatuhan terhadap kebijakan dan protokol kesehatan yang ditetapkan. Sebagai contoh, tingginya angka kasus positif di klaster permukiman dan perkantoran di perkotaan misalnya, tidak akan terjadi apabila elemen kunci pada kedua klaster tersebut, yakni Ketua RT/RW dan pimpinan unit kerja, memiliki komitmen dan kepemimpinan yang kuat. Ketua RT/RW harus turun ke lapangan langsung untuk mengecek kepatuhan warganya terhadap protokol kesehatan. Begitu juga pimpinan unit kerja, harus mampu menyeimbangkan objektif organisasi dengan kesehatan para pegawai atau karyawannya. Kepatuhan pada protokol kesehatan menjadi kunci. Melalui pendekatan kewaspadaan nasional yang diperlakukan oleh segenap komponen bangsa.

Dalam meningkatkan kewaspadaan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman nimiriliter termasuk bahaya pandemi Covid-19 ini pemerintah memiliki tanggung jawab secara menyeluruh dengan menempatkan keamanan dan keselamatan bangsa sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

BAB IV

PENUTUP

17. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disusun simpulan sebagai berikut:

- a. Tingkat kewaspadaan nasional bangsa Indonesia dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 relatif masih rendah. Rendahnya tingkat kewaspadaan nasional menghadapi bahaya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak pada penurunan ekonomi sampai pada tingkat pertumbuhan sebesar minus 5,02 persen. Sementara dalam aspek kesehatan, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 telah meningkatkan kasus angka kematian sebesar 2,75 persen.
- b. Penyusunan tata kelola secara terstruktur oleh pemerintah kepada aparatur dan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman nirmiliter seperti bahaya pandemi Covid-19, mampu membentuk suatu sinergi antara lembaga dan antar aparatur pemerintah dengan masyarakat. Susunan tata kelola ini akan mampu mendukung peningkatan kewaspadaan nasional guna melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap berbagai potensi yang dapat mengganggu keselamatan dan kedaulatan bangsa.
- c. Berbagai langkah strategi diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan bangsa Indonesia guna menghadapi berbagai potensi ancaman nirmiliter bahaya pandemi Covid-19. Langkah strategis untuk meningkatkan kewaspadaan nasional ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan dini dan penanggulangan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keselamatan bangsa.

18. Rekomendasi

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas untuk meningkatkan kewaspadaan nasional bahaya pandemi Covid-19 terhadap keselamatan bangsa dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Presiden dapat merumuskan kebijakan meningkatkan kemampuan analisis aparatur pemerintah tentang berbagai potensi ancaman yang dapat menganggu keamanan dan kedaulatan seluruh bangsa Indonesia, sehingga mampu untuk mengatasi dan menganggulangi dengan melakukan mitigasi.
- b. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bersama Ketua Satgas Penanganan Pandemi Covid-19 tingkat pusat dan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya kewaspadaan nasional dalam menghadapi bahaya pandemi Covid-19 kepada aparatur pemerintah di tingkat pusat dan daerah, agar terwujud suatu peningkatan dan kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan/peraturan pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19.
- c. Kepala BNPB selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 tingkat pusat untuk mengintruksikan kepada seluruh kepala daerah selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 tingkat daerah untuk mengimplementasikan meningkatkan kewaspadaan nasional dalam penanggulangan bahaya pandemi Covid-19 melalui kesatuan pengendalian dalam penanganan pandemi Covid-19. Agar kebijakan dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memiliki efektifitas dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk memutus rantai penyebaran.
- d. Menteri Kominfo untuk membangun kewaspadaan nasional melalui peningkatan sarana informasi dan komunikasi yang efektif, akurat dan jelas antar institusi pemerintah yang tergabung dalam Satgas Covid-19 pada tingkat pusat dan daerah agar dapat memberikan informasi dan saluran komunikasi untuk meningkatkan kualitas informasi yang beredar kepada masyarakat tentang wabah Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

Sumber Buku dan Jurnal

Amri, Mohd. Robi; Yulianti, Gita; Yunus, Ridwan; Wiguna, Sesa; Adi, Asfirmanto W.; Ichwana, Ageng Nur; Randongkir, Roling Evans; Septian, Rizky Tri. 2016. Risiko Bencana Indonesia. BNPB. Jakarta

Bappenas, 2008, Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) Tahun 2005 s.d 2025, hal 31.

Hayati, Nilda. 2017. Konsep khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia, Kajian living Alquran perspektif komunikasi. Episteme, Vol 12(1), pp 169-200

Indrawan, Jerry. 2015. Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritime. Jurnal Pertahanan Vol 5 (2). Pp.93-114

Jutmini, Sri. Winarno. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Tiga Serangkai: Surakarta.

Kemenko Maritim; Kapushidrosal dan Kabadan Info Geospasial. Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayah RI. Tanggal 10 Agustus 2018

Kurniawan, Lilik; Yunus, Ridwan; Amri, Mohd. Robi; Pramudiarta, Narwawi. 2011. Indeks Rawan Bencana Indonesia. BNPB. Jakarta.

- Marimin. 2007. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan dan Sistem Pakar (D. M. Nastiti Ed. Cetakan 1 ed.). Bogor: IPB Press.
- Morgenthau, Hans J. 1948. Politics Among Nations, The Struggle For Power And Peace. Associate Professor Of Political Science, The University of Chicago. New York: Alfred A Knopf.
- Pokja Lemhannas, 2012, Pengertian Kewaspadaan Nasional, Lemhannas, Modul I, Jakarta, hal. 19.
- Riyanto, Joko. 2017. Kewaspadaan nasional, Bela Negara dan Integrasi Nasional. Media Informasi Kemhan, Wira, Vol 67 (51). Jakarta.
- Renhoard, John Musa. Politik identitas era orde baru di Indonesia memasuki era reformasi. *Societas Dei*. Vol 06 (1). pp. 115-131.
- Saxena, JP, & Vrat, Prem. 1992. Hierarchy and classification of program plan elements using interpretive structural modeling: a case study of energy conservation in the Indian cement industry. *Systems practice*, Vol. 5(6), pp. 651-670.
- Sulisworo, Dwi; Wahyuningsih, Tri dan Arif, Dikdik Baehaqqi. 2012. Identitas Nasional. Program Hibah PKN, Jakarta.

Sumber Internet

- Agus. 2019. Petaka mati lampu se-Jawa 2019, listrik RI rapuh salah siapa?. CNBC. Jakarta, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190805074145-4-89757/petaka-mati-lampu-se-jawa-2019-listrik-ri-rapuh-salah-siapa>
- Akhir, Dani Jumadil. 2019. Mati listrik serentak, PLN hitung kerugian Rp 90 miliar. Okezone, Jakarta. Okezone.com. <https://economy.okezone.com/read/2019/08/05/320/2087716/mati-listrik-serentak-pln-hitung-kerugian-rp90-miliar>
- Anwar, Raffi. 2011. Ancaman Militer dan Nirmiliter. Kompasiana, Jakarta. Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/daris/5508e9a6a33311da5b2e3fc9/ancaman-militer-dan-nirmiliter#>
- Armani, Mela. 2020. 11.587 kasus positif Covid-19, ini 10 daerah di Indonesia dengan kasus tertinggi. Kompas, Jakarta. Kompas.com.

- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/05/061300365/11.587-kasus-positif-covid-19-ini-10-daerah-di-indonesia-dengan-kasus>.
- BSSN. 2019. Keaspadaan nasional dalam menghadapi ancaman siber. BSSN, Jakarta. Badan Siber dan Sandi Negara, <https://bssn.go.id/kewaspadaan-nasional-dalam-menghadapi-ancaman-siber/#>
- Citradi, Tirta. 2020. Ekonomi RI & ASEAN Babak Belur Dihajar Corona, Q2 Lebih Ngeri. CNBC. Jakarta. CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200508062652-4-156990/ekonomi-ri-asean-babak-belur-dihajar-corona-q2-lebih-ngeri/2>
- CNN, Tim. 2018. Panglima Resmikan Satuan TNI Terintegrasi di Natuna. CNN Indonesia, Jakarta. Trans Media, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181218180004-20-354636/panglima-resmikan-satuan-tni-terintegrasi-di-natuna>.
- Detik, Tim. 2020. Lega Pemerintah Indonesia Grafik Tambahan Kasus Corona Relatif Rendah. Detik, Jakarta. Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5007954/lega-pemerintah-indonesia-grafik-tambahan-kasus-corona-relatif-rendah/3>
- Ferdianto, Rizky. 2020. Tidak ada negara kebal penyelundupan. Tempo, Jakarta, PT Tempo Inti Media Tbk, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/160221/wawancara-dirjen-bea-cukai-heru-pambudi-soal-larangan-ekspor-apd-hingga-penyelundupan>
- Hasan, zulkifli. 2018. Memori Krisis Moneter 1997/1998. Jakarta, Detik.com, <https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-19971998>
- Jappy, Opa. 2017. Mereka hanya ingat pemberontakan PKI. Kompasiana. Jakarta. Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/opajappy/59c4c854da14f90d765a71d2/mereka-hanya-ingat-pemberontakan-pki#>
- Jayani, Dwi Hadya. 2020. Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19. Katadata. Jakarta, Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/infografik/2020/05/01/ancaman-kemiskinan-akibat-krisis-covid-19>.
- Kami, Indah Mutiara. 2019. Ada 4 Kereta MRT Terhenti di Bawah Tanah Imbas Listrik Padam. Detik. Jakarta. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4651567/ada-4-kereta-mrt-terhenti-di-bawah-tanah-imbas-listrik-padam>.

- Kemkes RI. 20202. Trend kasus TB di Indonesia. Kemenkes. Jakarta,
<https://tbindonesia.or.id/images/slide/situasi-tb-di-indonesia-tahun-2020-Slide2.JPG>
- Kumalasari, Alfianasyah. 2020. Mewaspada Kriminalitas Saat Pandemi Covid-19. Bali Express. Denpasar, PT Jawa Pos Multi Media,
<https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/01/191867/mewaspada-kriminalitas-saat-pandemi-covid-19>
- Manalu, Juli Etha Ramaidha, 2019. Bakamla Diperkuat, Bagaimana Peran Satgas 115 ke Depan?. Ekonomi & Bisnis, Jakarta. Bisnis.Com,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190508/99/920296/bakamla-diperkuat-bagaimana-peran-satgas-115-ke-depan>
- Marsyukrilla, Eren; Rosalina, M Puteri; Yuniarto, Topan; Chryshna, Mahatma. 2019. Virus-virus yang Menggemparkan Dunia. Kompas, Jakarta. PT Kompas Media Nusantara, <https://interaktif.kompas.id/baca/virus-menggemparkan/>
- Pusparina, Yosepha; Lidwana, Andrea. 2019. Infografik: Kacaunya Pulau Jawa Ketika Listrik Padam. Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/infografik/2019/08/06/infografik-kacaunya-pulau-jawa-ketika-listrik-padam/>
- Pusparisa, Yosepha. 2020. Dunia diambang krisis ekonomi terburu. Katadata, Jakarta, katadata.co.id, <https://katadata.co.id/infografik/2020/04/29/dunia-di-ambang-krisis-ekonomi-terburu/#>
- Putratama, Rozar. 2020. Pengaruh Cuaca dan Iklim Terhadap Pandemi COVID-19, Press Release. Badaan Metrologi Geofisika dan Klimatologi, Jakarta, BMKG, <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=pengaruh-cuaca-dan-iklim-terhadap-pandemi-covid-19&tag=press-release&lang=ID>
- Ramadhani, Pipit Eka. 2020. Nasib Dunia Usaha di Tengah Pandemi Corona, Siapa Bertahan, Tertekan atau Justru Tumbuh? Liputan 6. Jakarta, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4228742/headline-nasib-dunia-usaha-di-tengah-pandemi-corona-siapa-bertahan-tertekan-atau-justru-tumbuh#>
- Rezkisari, Indira. 2020. Melawan Corona dengan Rempah-Rempah Tradisional. Republika. Jakarta, Republika.co.id,

- <https://republika.co.id/berita/q6khjy328/melawan-corona-dengan-rempah-rempah-tradisional>
- Rizal, Jawahir Gustav. 2020. Update Virus Corona di ASEAN: Singapura Kasus Tertinggi, Malaysia Terbanyak Sembuh. Kompas, Jakarta, Kompas.com, "<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/03/203213565/update-virus-corona-di-asean-singapura-kasus-tertinggi-malaysia-terbanyak>".
- Sari, Nursita. 2019. Lima fakta listrik pada, kerugian diperkirakan triliunan rupiah. Kompas, Jakarta. Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/07/06113891/5-fakta-listrik-padam-kerugian-diperkirakan-triliunan-rupiah-hingga?page=all>
- Sanjoyo, Danu. 2020. Mengantisipasi Dampak Covid-19 ke Perekonomian Nasional. Media Indonesia, Jakarta, Media Group, <https://mediaindonesia.com/read/detail/296853-mengantisipasi-dampak-covid-19-ke-perekonomian-nasional>
- Setiawan, Adam. 2018. Terlupakanya asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mtero jambi, Jambi, Mterojambi.Com, <https://metrojambi.com/read/2018/12/13/38164/terlupakanya-asas-keselamatan-rakyat-adalah-hukum-tertinggi/>
- Tim Liputan6. 2003. Keberadaan SARS di Indonesia Diumumkan Hari Ini. Liputan 6. Jakarta, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/news/read/52312/keberadaan-sars-di-indonesia-diumumkan-hari-ini>
- Widhana, Dieqy Hasbi. 2020. Riwayat Perjalanan Pasien Positif Corona COVID-19 di Indonesia. Tirto, Jakarta, Tirto.id, <https://tirto.id/riwayat-perjalanan-pasien-positif-corona-covid-19-di-indonesia-eCn3>
- Worldmeter. 2020. Corona Virus. Worldmeter, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
- Wudya, Niken Yunita. 2020. Memahami Lagi Arti Lockdown, COVID-19, dan pandemi. Detik news, Jakarta, detik network, <https://news.detik.com/berita/d-4956587/memahami-lagi-arti-lockdown-covid-19-dan-pandemi>.
- Yusgiantoro, Purnomo. 2019. Belajar memahami teori ancaman. ITB, Bandung. <https://www.itb.ac.id/news/read/57328/home/belajar-memahami-teori-ancaman-dari-prof-purnomo-yusgiantoro>



RIWAYAT HIDUP



Fernando Situmeang, S.T. dilahirkan di Sumatera Utara di wilayah Perkebunan PTP IX kota Binjai, pada tanggal 8 Februari 1971. Jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas dihabiskan seluruhnya di kota kelahirannya samapai pada tahun 1989. Kemudian, penulis mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Laut di Surabaya dan menyelesaikannya pada tahun 1992, lulus dikpasis tahun 1993 dan melaksanakan tugas ke KRI Sigalu-857 di Tanjung Uban. Lulus dari Diklapa I tahun 1996, selanjutnya kembali berdinas ke Kapal tipe Penyapu Ranjau, tahun 2000 dipindah tugaskan ke kapal tipe Frosch berjenis LST. Ditengah masa kedinasannya Penulis menikahi istri yang bernama Rini Hosanna M.S. dan dikaruniai 1 orang putra. Selanjutnya penulis bertugas di staf Mabesal dan mengikuti Diklapa II serta lulus tahun 2002. Lulus pendidikan seskoal tahun 2007, mengikuti pendidikan strata satu bidang Teknik Bangunan Kapal dan lulus tahun 2012, lulus Pendidikan Sesko TNI tahun 2019 dan terakhir mengikuti Program PPRA LXII Lemhannas RI. **Pengalaman Penugasan.** Lulus dari Dikpasis tahun 1993 Penulis berangkat menempati tugas perdana masuk ke Kesatuan Kapal Patroli Armada Barat di wilayah Pulau Bintan tepatnya di Tanjung Uban, masuk ke KRI Sigalu-857 sebagai Asisten Kepala Departmen Permesinan. Medan operasi Patroli di laut dilalui selama berada di KRI dengan tipe kapal yang berbeda selama 9 tahun. Selanjutnya berdinas di staf Mabesal bidang logistik di tahun 2002. Penulis banyak berkecimpung dan bertugas dibidang Logistik, pemeliharaan dan perbekalan dalam mendukung alutsista KRI dalam berbagai Kesatuan. Selesai pendidikan Seskoal 2007 diberi kepercayaan berdinas di Kolinlamil Jakarta bidang program dan anggaran, kemudian tugas selanjutnya kembali ke Mabesal pada tahun 2009. Tahun 2015 mendapat promosi kepercayaan menjabat Asisten Logistik di Lantamal II Padang. Mengikuti pendidikan Sesko TNI lulus Tahun 2019 dan tahun 2020 menempati jabatan sebagai Direktur Pembinaan di Lembaga Pendidikan Seskoal sampai dengan sekarang.